



● TABLOID

REFERENSI PEMILU 2024 ●

info indonesia

MINGGU | DESEMBER 2023

HARGA, @ Rp 20.000,-



*Road to
Election
2024*



'GEMOY' DIPASTIKAN MENANG SATU PUTARAN

● **YAKINLAH
PILPRES 2024
SATU PUTARAN**

● **KADER PPP
JANGAN
MBALELO**

● **CALEG MUDA
GIAT BERTARUNG
TARIK PERHATIAN
MILENIAL**

● **PENINDAKAN
HUKUM MEROSOT
TAJAM DI AKHIR
JABATAN**

● **FIGUR MUDA
UBAH DINAMIKA
POLITIK
KALBAR**

● **PRABOWO
REBUT
SUARA
PPP-
PKB**

● **CALEG:
SIAP
LAHIR
BATIN**

● **CALEG:
YAKIN
BISA
MENCAPAI
TARGET**

● **ISU PALESTINA
MAMPU
TINGKATKAN
ELEKTABILITAS**

● **PENILAIAN
PENEGAKAN HUKUM
DI INDONESIA
BERSIFAT SUBJEKTIF**



“Jadi publik melihat
dugaan ada keuntungan
ataupun kerugian bagi
pasangan calon tertentu
dari format debat itu”

Titi Anggraini



Berebut Simpati

Memasuki minggu pertama kampanye, seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden langsung tancap gas menyisir lumbung-lumbung suara. Dinamika politik yang cepat membuat semua kandidat punya peluang sama meski hasil survei berbeda. Hasil survei masih menjadi alat ukur untuk membedakan di mana letak keunggulan para calon masing-masing. Untuk sementara ini, pasangan nomor urut 02 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih terus unggul. Sementara pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menunjukkan grafik meningkat dan bisa meninggalkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Peningkatan suara AMIN tidak lain karena masifnya para kader pendukung mensosialisasikan pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin. Partai Nasdem, PKS dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) cukup militan memenangkan pasangan ini. Sehingga tidak heran pasangan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di sisi lain pasangan AMIN juga bisa dikatakan bebas dari drama-drama politik seperti yang dialami pasangan Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran. Sentimen-sentimen negatif mewarnai kedua pasangan ini. Keberhasilan Jokowi membangun Indonesia selama dua periode seakan hilang tanpa jejak di mata pendukung Ganjar-Mahfud. Meski Pilpres 2024 belum berlangsung, namun banyak pihak yang memprediksi kalau hanya berlangsung satu putaran. Bahkan, pemenangnya juga sudah tahu yakni Prabowo-Gibran. Prediksi ini tentu bukan tanpa alasan karena disampaikan melalui kajian dan analisa. Selain didukung banyak partai, Prabowo-Gibran juga banyak mendapat sokongan para elit partai, sehingga terjadi ketimpangan kekuatan. Bagaimana bentuk kajiannya bisa dibaca di Info Survei edisi kali ini. Berbagai peristiwa juga tak lepas dari pengamatan tim pemenang. Isu yang paling hangat dan potensi meningkatkan simpati tentu saja soal konflik Palestina. Bencana kemanusiaan yang menimpa umat Islam di Palestina akibat agresi zionis Israel membuat seluruh politisi beramai-ramai memberi simpati dengan tujuan akhir bisa meningkatkan elektabilitas. Selain mengupas soal Pilpres, di edisi kali ini kami juga menginformasikan tentang dinamika politik di daerah yang ternyata tidak kalah panasnya. Pertarungan para caleg di pemilihan legislatif juga cukup seru. Masing-masing kader berebut simpati untuk mengambil hati pemilihnya. Ada yang datang dengan membawa berbagai program, ada yang membawa buah tangan, dan ada pulang yang membawa janji-janji. Masyarakat tinggal memilih mana yang mereka suka. Ada banyak informasi menarik lainnya yang kami informasikan melalui tabloid Info Indonesia dengan harapan bisa menambah wawasan. Selamat membaca!!!



info indonesia INOVASI UNTUK NEGERI

INFOINDONESIA.ID adalah media
massa cetak di bawah payung
PT. DUA SATU PRO
Sertifikat Dewan Pers
Nomor 969/DP-Verifikasi/K/III/2022

PENDIRI/ DIREKTUR : Usman Rizal

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Adam Aulia Manzan Khan **PEMIMPIN REDAKSI:** Rusdiyono **WAKIL PIMPINAN REDAKSI:** Rahmad Romli
REDAKTUR PELAKSANA: Irmayani **REDAKTUR:** Rio Taufiq Adam, Fonda Lapod, Rusdy Setiawan Putra, Irmayani, Rusdiyono, Nina Erlina **REPORTER:** Nefri, Indra Hadi, Pahmi Ramadhan, Moehamad Moeslim, Sadam M, Hardi Aar, Reno, Aldi Rinaldi, M. Iqbal, Andyanto, M. Yadh, Muhammad Fiqri, Muhammad Khaidir **EDITOR & GRAFIS:** Al Amin, Achilles **TATA LETAK:** Sujatmiko **MEDIA SOSIAL:** Haidir Ali **KEUANGAN :** Dra Hj Nurkhamida **SEKRETARIS REDAKSI:** Nur Aisah **PENGEMBANGAN BISNIS:** M. Iqbal, Zul Fahmi **ADMINISTRASI:** Ega Tri Gustina **DISTRIBUSI:** Abdul Muchtar

HARGA IKLAN: 1 Halaman ukuran 290 mm x 420 mm Rp.25.000.000,-include PPN 11 %.

1/2 Halaman ukuran 145 mm x 210 mm Rp. 12.500.000,-

BANK ACCOUNT: *A/N : PT. DUA SATU PRO, BCA: No.Rek: 5530682121 KCP Otista Jakarta Timur **ALAMAT REDAKSI/IKLAN/**

PEMASARAN: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750 **TELP** 021-791 96781 **FAX** 021-791 96786 **PALEMBANG** Jalan Puncak Sekuning Lorong Sahabat No 2 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang 30126 **TELP :** 0711-7442344



“Prabowo bukan saja ingin merebut ceruk suara PPP dan PKB, tetapi bertarung merebut ceruk pemilih Islam dari kalangan pondok pesantren di basis PPP dan PKB”

Efriza

PRABOWO REBUT SUARA PPP-PKB

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, melakukan lawatan ke Tasikmalaya, Jawa Barat, pada hari pertamanya melakukan kampanye Pilpres 2024. Menariknya, Tasikmalaya merupakan kandang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sebagai ceruk suara PPP dan PKB, di Tasikmalaya terdapat banyak sekali tokoh Islam moderat. Disinyalir, Prabowo melakukan kampanye di kandang PPP dan PKB itu untuk mengambil ceruk suara mereka.

Analisis politik Citra Institute, Efriza, menilai, adapun tujuan Prabowo melakukan kampanye di Tasikmalaya karena ingin merebut suara PPP dan PKB. Selain itu, Prabowo juga ingin mendapatkan dukungan dari pemilih Islam moderat.

“Prabowo bukan saja ingin merebut ceruk suara PPP dan PKB, tetapi Prabowo bertarung merebut ceruk pemilih Islam dari kalangan pondok pesantren di basis PPP dan PKB,” kata Efriza kepada Info Indonesia, Minggu, 3 Desember 2023.

Dia mengatakan, ada perbedaan gaya kampanye Prabowo di Pilpres 2019 dengan 2024. Dia menyebut, saat ini mantan Danjen Kopasus tersebut cukup berani dalam mengambil langkah politiknya untuk kampanye. Dia menilai, pada Pilpres 2024, Prabowo sangat percaya diri.

“Ini menunjukkan keberanian dan kepercayaan diri Prabowo,” kata Efriza.

Dia menjelaskan, pada dasarnya Jawa Barat merupakan ceruk suara dari Prabowo. Akan tetapi, ada beberapa wilayah di Jawa Barat di mana suara Prabowo begitu lemah, salah satunya di Tasikmalaya. Selain itu, elektabilitas Prabowo sempat turun di Jawa Barat. Maka, kata Efriza, menjadi wajar bila Prabowo memilih Tasikmalaya untuk mengawali kam-

panyanya.

“Jawa Barat pada dasarnya basis besar dari Prabowo. Hanya saja Prabowo sempat mengalami penurunan elektabilitas. Anies dan Ganjar perlahan menaik medio Oktober,” ujar Efriza.

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang ini mengatakan bahwa Prabowo ingin menguasai seluruh ceruk suara di Jawa Barat. Selain itu, dia ingin menenggelamkan suara PPP dan PKB. Sehingga, ceruk pemilih dari dua partai itu beralih ke Prabowo.

“Kesadaran ini yang ditengarai dipunyai dan dilakukan oleh Prabowo. Ia akan kembali menguatkan Jawa Barat sebagai kekuatan basis mereka. Sekaligus, memasuki basis daerah di daerah Jawa Barat yang masih sebagai kekuatan PPP dan juga PKB untuk memperoleh basis massa di sana,” terang Efriza.

Dia mengatakan, langkah politik yang diambil Prabowo itu memang patut menjadi perhatian PPP dan PKB. Apalagi, saat ini Prabowo sangat mahir dalam merawat pemilih lamanya. Selain itu juga, Prabowo ingin mengambil ceruk pemilih baru. Sehingga, suaranya di Pilpres bisa meningkat tajam. Apalagi, Jawa Barat merupakan provinsi yang jumlah pemilihnya cukup besar.

“Keberanian Prabowo dengan prinsip merawat basis lama dan mengambil ceruk pemilih baru dari basis lawan ini yang tentu saja perlu dikawatirkan oleh PPP dan PKB dalam menjaga basis pemilihnya dan membantu elektabilitas capres yang diusungnya, apalagi jelas pula trend elektabilitas

Prabowo terus meningkat,” jelas Efriza.

Di samping itu, Efriza memprediksi bahwa Prabowo memiliki target besar di akhir tahun ini. Prabowo ingin elektabilitasnya di penghujung tahun bisa meningkat secara dratis. Hal ini merupakan strategi politik cemerlang yang ditunjukkan oleh Prabowo.

“Diyakini Prabowo menargetkan elektabilitas pasangan ini di bulan Desember bisa tak lagi menyusut di basis daerahnya Jawa Barat, minimal kembali menguat tetapi penguatannya ditambah memperoleh basis baru,” kata Efriza.

Dia menambahkan, Prabowo memang sejak dari awal ingin mendapatkan dukungan yang besar dari pemilih Islam moderat. Hal itu terlihat ketika dirinya berkunjung ke pimpinan pondok pesantren di beberapa daerah di Indonesia.

“Ceruk pemilih yang disasar Prabowo adalah kalangan Islam pesantren, jelas Islam moderat dan tradisional sasaran Prabowo,” ujar Efriza.

Dikatakan Efriza, Menteri Pertahanan itu tentunya ini basis Islam menjadi pendukungnya di Pilpres 2024. Meski, partai yang mengusung dirinya merupakan partai nasional, akan tetapi Prabowo menganggap bahwa ceruk pemilih Islam juga perlu dirangkul menjadi pendukungnya.

“Ini menunjukkan Prabowo ingin menguatkan dari basis Islam.

Prabowo ingin buktikan dirinya meski pasangan ini dari nasionalis, tetapi kekuatan ceruk pemilih Islam juga persentasenya tinggi, utamanya kalangan pesantren,” kata Efriza.

Memasuki kandang PPP adalah tantangan yang harus dihadapi Prabowo. Sebab bukan saja kekuatan Prabowo dapat menguat. Tetapi memungkinkan efek ekor jas menguatkan Gerindra.

Efriza menilai, jika Prabowo berhasil merebut ceruk suara dari PPP dan PKB, kemungkinan besar kedua partai tersebut terancam tidak akan lolos Parlemen. Sebab, Prabowo berhasil merebut suara utama dari kedua partai itu.

“Jika ini bisa dilakukan oleh Prabowo memungkinkan pula PPP benar-benar nyata akan terlempar dari Senayan, karena kekuatan basis massa pemilihnya bukan saja diterobos tetapi sudah keropos, karena beralih ke Prabowo dan Gerindra,” tutur Efriza.

Dia menambahkan, PKB perlu khawatir dengan langkah politik yang diambil oleh Prabowo. Disampaikan Efriza, Prabowo pasti memiliki tekad besar untuk

menunjukkan ke pasangan lainnya bahwa basis massa Islam kekuatan mereka tidak terlalu besar.

“Sebab, Prabowo meski dari unsur nasionalis tetapi personalnya adalah figur yang dipercaya oleh kalangan pesantren. Ini tentu saja jika Prabowo berhasil menguatkan basis barunya di kandang PKB, adalah fakta yang miris, PKB ternyata bisa rapuh juga,” tandas Efriza.

•RDO





SUARA GANJAR-MAHFUD DIHAJAR SENTIMEN NEGATIF

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapatkan sentimen negatif dari publik lewat penurunan elektabilitas yang dilaporkan beberapa lembaga survei. Pasangan ini bahkan melorot ke posisi ketiga di bawah Prabowo-Gibran dan Anies-Muhaimin.

Berdasarkan survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO) mengenai peta elektabilitas tiga pasang calon di Pilpres 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 36,2 persen, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 34,1 persen, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD 27,1 persen.

Temuan survei ini sangat menarik. Tetapi, tidak ada perbedaan dengan survei lainnya yang menempatkan pasangan Prabowo-Gibran di posisi teratas. Namun, dari survei itu diketahui bahwa pasangan Anies-Muhaimin jauh meninggalkan Ganjar-Mahfud.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos, menilai, penurunan elektabilitas Ganjar-Mahfud dikarenakan konflik dengan Prabowo-Gibran. Kedua pasangan itu saling lempar sindir. Bahkan, tak ayal sindiran itu disampaikan di ruang publik. Sehingga, membuat masyarakat menilai Ganjar-Mahfud memiliki sentimen negatif dengan Prabowo-Gibran.

“Artinya sentimen negatif yang coba diciptakan oleh kubu Ganjar-Mahfud, utamanya PDIP, dengan menyerang Presiden Jokowi dengan isu politik dinasti, Mahkamah Keluarga, haus kekuasaan, dan lain-lain, tidak berpengaruh signifikan terhadap elektabilitas Prabowo-Gibran, malah berbalik merugikan elektabilitas Ganjar-Mahfud,” kata Subiran kepada Info Indonesia.

Di satu sisi, PDIP juga telah menunjukkan sentimen negatifnya kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan pencapresan Gibran Rakabuming Raka. Menurut Subiran, sentimen yang dibangun oleh partai pengusung Ganjar-Mahfud itu tidak berpengaruh besar terhadap pencapresan Prabowo-Gibran.

“Itu artinya orang-orang yang kecewa kepada Presiden Jokowi atas pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo hanya berasal dari elite PDIP dan yang terafiliasi dengannya, serta sebagian kecil kalangan akademisi dan mahasiswa. Sementara basis utama grassroot tetap solid tegak

lurus pada Jokowi dengan mendukung Prabowo-Gibran,” kata Subiran.

Elektabilitas Prabowo-Gibran cukup tinggi karena keduanya dipahami terasosiasi langsung kepada Presiden Jokowi. Artinya basis massa loyal dari Presiden Jokowi sangat solid mendukung Prabowo-Gibran. Selain itu, serangan politik dinasti membuat ceruk suara dari pendukung Jokowi terbelah menjadi dua.

“Yakni ke Prabowo dan Ganjar. Nah, sekarang posisinya solid ke Prabowo-Gibran dan ini tentu semakin merugikan Ganjar-Mahfud,” kata Subiran.

Disampaikan Subiran, seharusnya elite PDIP, para pengusung dan pendukung Ganjar-Mahfud memahami bahwa Pilpres 2024 masih sangat ditentukan oleh Jokowi effect. Sehingga, menyerang Jokowi dengan vulgar dengan berbagai framing dan penggiringan isu, justru akan semakin menyolidkan basis pemilih Jokowi dan Prabowo di akar rumput.

“Sebab yang mengonsumsi isu MK, politik dinasti, haus kekuasaan hanya golongan elite dan kelas menengah, semisal masyarakat akademis seperti mahasiswa, dosen, organisasi, budayawan, seniman. Tetapi, basis massa akar rumput yang sudah terlanjur loyal pada Presiden Jokowi justru akan semakin solid mendukung Prabowo Gibran,” kata Subiran.

Politik teraniaya yang dimainkan oleh elite PDIP dan poros Ganjar-Mahfud juga tidak berpengaruh signifikan pada elektabilitas Ganjar-Mahfud. Hal ini disebabkan karena semua isu negatif yang diproduksi dan

diframming secara massif tentang Presiden Jokowi belum bisa mengalahkan tingkat kepercayaan publik yang 80 persen dari grassroot.

“Artinya elite PDIP dan para pengusung Ganjar-Mahfud memiliki pekerjaan rumah yang cukup serius jika mau lolos putaran kedua,” kata Subiran.

Sikap elite PDIP dan para pengusung yang ambigu juga turut mempengaruhi merosotnya elektabilitas Ganjar-Mahfud. Di satu sisi, menyerang Prabowo-Gibran dan Presiden Jokowi dengan isu politik dinasti, mahkamah keluarga, haus kekuasaan, netralitas, kecurangan, politik teraniaya. Tetapi di sisi lain PDIP tidak berani memecat Gibran dan memberi teguran kepada Presiden Jokowi sebagai kader PDIP.

“Tidak bersikap tegas dalam koalisi pemerintahan (tidak menarik diri dengan menarik menteri dari pemerintahan sebagai bentuk tegas pecah kongsi tersebut),” kata Subiran.

Dikatakan Subiran, wacana dan perilaku politik yang ambigu dari Ganjar-Mahfud juga mempengaruhi merosotnya elektabilitas keduanya. Di satu sisi pasangan Ganjar-Mahfud juga mengusung tagline keberlanjutan pemerintahan Presiden Jokowi. Anehnya, pasangan tersebut malah menunjukkan senti-

men negatifnya kepada Presiden Jokowi.

“Tapi belakangan ini malah banyak mengkritik kebijakan dan sepak terjang Presiden Jokowi yang dinilai gagal, misalnya dari segi hukum dan HAM,” jelas Subiran.

Seharusnya, Ganjar-Mahfud tidak menyerang Presiden Jokowi dan fokus menyosialisasikan gagasan, program dan semua hal positif lainnya dari kedua pasangan ini. Sebab, Ganjar dan Mahfud punya kekuatan figur yang baik untuk mempengaruhi elektoral.

Misalnya Ganjar ini figur merakyat yang identik dengan Jokowi, sama-sama berasal dari rakyat bawah, benar-benar turun ke rakyat, memahami kebutuhan dan kepentingan rakyat. Sedangkan, Mahfud MD juga punya keunikan yakni dikenal dengan kejujuran, bersih dan berintegritas.

“Hal-hal ini seharusnya yang terus ditonjolkan. Fokus pada kelebihan pasangan capres dan cawapres, bukan malah sibuk menyerang Prabowo-Gibran,” tutur Subiran.

Posisi politik Ganjar-Mahfud dalam Pilpres ini ibarat “Maju kena, mundur kena”. Di satu sisi ingin menanggalkan tagline keberlanjutan dan mengusung perubahan, tetapi tidak akan berpengaruh banyak terhadap terperolehan suara.

Sebab, isu perubahan sudah di kapling oleh Anies-Muhaimin.

“Mau kembali mengusung tagline keberlanjutan tapi sudah terlanjur vulgar menyerang Jokowi. Maka yang harus dilakukan sebenarnya adalah memainkan tagline keberlanjutan dan perubahan secara proporsional tanpa menyerang pihak manapun dengan fokus pada kelebihan dan kekuatan program, gagasan, figur dan politik gotong royong,” tandas Subiran. •RDO





“AMIN berpeluang menang hanya di wilayah-wilayah tertentu di Jawa Barat, terutama di kota-kota yang nempel DKI Jakarta, seperti Kota Depok karena infrastruktur kepartaian PKS cukup solid”

Yusak Farchan

AMIN INCAR 45 PERSEN SUARA JAWA BARAT

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, menargetkan suara yang maksimal di Jawa Barat. Diperkirakan bakal jadi salah satu lumbung suara di Pilpres 2024, AMIN menargetkan meraih dukungan 45 persen dari suara sah.

Dekan FISIP Universitas Pamulang, Yusak Farchan, mengatakan, target yang diinginkan pasangan AMIN cukup rasional. “Sah-sah saja jika pasangan AMIN menargetkan 45 persen di Jawa Barat,” kata Yusak kepada Info Indonesia, Senin, 4 Desember 2023.

Namun, menurut Yusak, untuk mewujudkan targetnya itu tidaklah mudah bagi pasangan AMIN. Sebab, AMIN akan berebut suara dengan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kata Yusak, Jabar juga merupakan lumbung suara Prabowo-Gibran.

“Tapi melihat kecenderungan yang ada, Jawa Barat merupakan basis Prabowo,” kata Yusak.

Berkaca pada Pilpres 2019, suara Prabowo selalu unggul dari lawan politiknya. Selain itu, basis Partai Gerindra juga cukup kuat di Jabar. “Dalam dua kali pilpres terakhir, Prabowo menang di Jawa Barat. Gerindra juga kuat di Jawa Barat,” kata Yusak.

Apalagi, saat ini, Ridwan Kamil menjadi Ketua TKD Prabowo-Gibran Jawa Barat. Menurut Yusak, hal ini akan semakin mempersulit gerakan dari AMIN di Tanah Pasundan. Yusak menilai, AMIN akan sangat sulit maraup suara di Jabar karena Ridwan Kamil merupakan tokoh politik yang dicintai oleh warga masyarakat Jabar.

“Selain itu, variabel Ridwan Kamil sebagai Ketua TKD Prabowo-Gibran Jawa Barat juga akan

memperkuat Prabowo-Gibran di Jabar. Rasanya sulit bagi AMIN untuk mengalahkan Prabowo di Jawa Barat,” kata Yusak.

Dia menilai, pasangan AMIN hanya akan bisa mengeruk suara di Jabar di daerah tertentu. Contohnya Depok atau kabupaten/kota lainnya yang berdekatan dengan DKI Jakarta. Sebab, kata Yusak, basis pemilih Anies Baswedan kuat di kota-kota penyangga Ibu Kota. Apalagi, mendapatkan dukungan dari PKS yang memiliki grassroot yang cukup kuat.

“AMIN berpeluang menang hanya di wilayah-wilayah tertentu di Jawa Barat, terutama di kota-kota yang nempel DKI Jakarta, seperti Kota Depok karena infrastruktur kepartaian PKS cukup solid,” terang Yusak.

Sementara itu, Direktur Rumah Politik, Fernando Emas, menilai, sedari awal pasangan AMIN memang ingin merebut ceruk suara di Jabar. “Jawa Barat merupakan salah provinsi yang diharapkan menjadi salah satu basis pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar,” kata Fernando.

Dikatakan Fernando, selain pasangan AMIN, Prabowo-Gibran juga menjadikan Jabar sebagai salah satu basis dukungan pada Pilpres 2024. Menurutnya, sangat wajar bilang pasangan AMIN menargetkan suara yang cukup besar di Jabar. Apalagi, salah satu partai pengusung yakni PKS, suaranya cukup kuat di Jabar.

“Wajar kalau pasangan AMIN menjadikan Jawa Barat sebagai lumbung suara pada Pilpres yang akan datang karena PKS sebagai salah satu pengusung AMIN memperoleh suara lebih dari 28 persen dari pemilih Jawa Barat,” kata Fernando.

Dia mengatakan, kader PKS yang juga mantan Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan mampu mendongkrak perolehan suara AMIN. Ditambah, suara PKB di Jabar juga terbilang cukup besar. Sehingga, membuat pasangan AMIN memiliki bargaining yang kuat di Jabar.

“Para pemilih PKB yang mencapai sekitar 14 persen dari pemilih yang ada di Jawa Barat akan memberikan kontribusi terhadap pasangan. Sehingga, jika dikalkulasi berdasarkan pada perolehan suara PKS dan PKB serta ketokohan Ahmad Heryawan. Sehingga, sangat wajar kalau pasangan AMIN menargetkan perolehan suara 45 persen dari Jawa Barat,” kata Fernando.

Namun di sisi lain, Fernando tidak begitu yakin jika pasangan AMIN bisa mewujudkan targetnya itu. Sebab, Prabowo juga merupakan tokoh yang sangat kuat di Jabar. Dia menilai, sebagai dari pendukung PKS dan PKB di Jabar akan membalelo ke pasangan Prabowo-Gibran.

“Namun saya tidak yakin kalau pasangan AMIN akan mampu meraih suara 45 persen karena Prabowo juga sangat kuat di Jawa Barat. Pemilih PKS dan PKB akan ada yang akan memilih Prabowo,” tutur Fernando.

Selain itu, partai baru seperti Gelora menjadi salah satu alat bagi pasangan Prabowo-Gibran untuk meraup suara di Pilpres. Sebab, Partai Gelora didirikan oleh mantan pendiri PKS. Jadi,

kata Fernando, hal yang tidak mungkin jika pasukan sakit hati PKS itu mendukung pencapresan Anies.

“Partai Gelora yang didirikan oleh mantan petinggi PKS bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo. Sehingga akan membuat banyak pendukung PKS mengalih dukungan pada Partai Gelora serta dukungan pada Prabowo,” jelas Fernando.

Menoleh pada Pilpres 2019, Prabowo unggul dari Jokowi hingga 60 persen. Menurutnya, ini bukti bahwa Prabowo memang sangat kuat di Jabar. “Kalau berdasarkan pada Pilpres 2019 yang lalu, Prabowo jauh unggul dari Jokowi dengan perolehan suara mencapai hampir 60 persen,” ujar Fernando.

Dia mengatakan, walaupun banyak pemilih Prabowo banyak yang kecewa terhadap sikap politik mantan Danjen Kopassus pada 2019 yang lebih memilih bergabung dalam kabinet Jokowi. Namun, Prabowo masih akan tetap lebih unggul dibandingkan perolehan suara AMIN.

“Partai Gerindra yang memperoleh sekitar 25 dan Partai Golkar sekitar 19 persen dari pemilih Jawa Barat akan menjadi modal pasangan Prabowo-Gibran untuk bisa unggul dari pasangan AMIN,” tandas Fernando.

•RDO



“Mungkin Pak Menko Polhukam yang sudah cawapres lagi sibuk, karena sibuk barang kali belum mendapat penjelasan yang utuh”

Bambang Wuryanto



REVISI UU MK SANDERA HAKIM KONSTITUSI

Rencana DPRD melakukan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) menuai polemik karena dinilai sarat kepentingan dan bakal melemahkan posisi hakim konstitusi.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyebut, 9 Fraksi sepakat tidak membahas revisi UU MK pada sidang paripurna 5 Desember 2023. Dalihnya, penundaan pembahasan itu untuk mencari persamaan sikap dan persepsi.

“Terkait dengan hal itu, sembilan fraksi sudah menyatakan persetujuannya untuk belum membahasnya pada Paripurna hari ini. Karena memang perlu ada persamaan sikap dan persamaan persepsi dari kedua belah pihak untuk bisa menyamakan hal tersebut,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 5 Desember 2023.

Puan menjelaskan, ada beberapa faktor yang membuat DPR menunda pembahasan revisi UU MK. Terutama, menjaga kondusivitas Pemilu 2024.

“Jadi ini daripada kemudian nanti membuat kisruh suasana dan suasana tidak menjadi kondusif, karenanya DPR menyepakati hal ini untuk ditunda terlebih dahulu untuk menyamakan sikap dan persepsi,” kata politikus PDIP tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, juga menekankan sembilan Fraksi DPR sepakat menunda membawa revisi UU MK ke Paripurna. Sikap itu bahkan diambil bukan karena adanya surat dari pemerintah yang masuk ke DPR.

“Jadi, kemarin dalam rapat terakhir antara pemerintah dengan DPR yang pertama itu 9 fraksi sudah menyepakati isi dari Pasal 87 (UU MK), saya enggak tahu versi yang mana yang dipegang Pak Mahfud (Menkopolhukam), lalu dari pemerintah itu ada Kemenkumham yang sudah menyepakati,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 4 Desember.

sementer 2023.

Dasco menekankan, pihaknya memang sudah menerima surat yang dikirimkan Mahfud MD yang meminta RUU MK tidak disahkan dulu. Namun, Dasco memastikan DPR sudah lebih dulu menyepakati untuk menunda Revisi UU MK dibawa ke Paripurna.

Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, yakin Menko Polhukam Mahfud MD akan menyetujui revisi keempat UU MK. Pacul mengatakan DPR tidak akan membahas lagi revisi UU MK dengan Mahfud karena sudah disepakati dalam pembahasan tingkat I. DPR hanya akan berdialog dengan Mahfud untuk menjelaskan pasal yang dipersoalkannya.

“Mungkin Pak Menko Polhukam yang sudah cawapres lagi sibuk, karena sibuk barang kali belum mendapat penjelasan yang utuh,” ujar Pacul.

Politisi PDIP ini meyakini, jika Mahfud sudah mendapatkan penjelasan yang utuh, maka tidak ada lagi simpang siur. Menurutnya, cawapres nomor urut 03 itu tidak akan lagi keberatan mengenai draf revisi UU MK yang sudah disetujui DPR.

“Ini hanya tinggal dialog kok. Saya pastikan, Pak Mahfud akan setuju, one hundred persen (100 persen). Dugaan saya lho ya karena tidak ada hal yang melanggar,” ungkap Pacul.

Lebih lanjut, Pacul menekankan bahwa Pasal 20 UUD 1945 ayat (1) menyatakan kuasa pembentuk undang-undang ada di tangan DPR. Ayat (2), lanjutnya, DPR membahas undang-undang itu bersama pemerintah. Oleh sebab itu, dia berpendapat sebenarnya kekuasaan membuat UU lebih banyak ada di DPR daripada pemerintah, sesuai amanat konstitusi itu.

Menurutnya, pemerintah hanya berhak menolak apabila tidak sanggup menjalani aturan dalam undang-undang yang sedang dibahas itu. “Misalnya dulu smelter mau dimasukkan, ‘Enggak bisa jalan ini,’ ‘Berapa kebutuhan?’ Diskusi. Ketika undang-undang minerba, ‘Oh butuh smelter, butuh waktu tiga tahun-tiga tahun setengah,’ ‘Oke,’ sambil persiapan kita masuk lima tahun. Kan begitu, iya toh?” jelas Pacul.

Sebelumnya, Mahfud menyatakan pemerintah masih keberatan dengan sejumlah isi revisi UU MK, salah satu poin keberatannya terkait aturan peralihan masa jabatan hakim konstitusi. Mahfud menyatakan seharusnya aturan peralihan masa jabatan tidak merugikan pihak yang terdampak aturan itu. Meski demikian, usulan beleid baru dari DPR malah merugikan sejumlah hakim konstitusi yang masih menjabat.

“Aturan peralihan itu kalau diberlakukan terhadap jabatan itu harus yang mengun-

tungkan atau sekurang kurangnya tidak merugikan subjek yang bersangkutan,” jelas Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023).

Dijelaskan, dalam Pasal 87 huruf a draf revisi UU MK yang disepakati DPR mengatur bahwa hakim konstitusi yang sudah menjabat 5-10 tahun baru melanjutkan jabatannya sampai dengan 10 tahun apabila disetujui lembaga pengusul.

Dalam hal ini, ada tiga hakim konstitusi yang akan terdampak ke aturan yang diusulkan oleh DPR itu yaitu Saldi Isra, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih. Ketiganya sudah menjabat lebih dari 5 tahun, namun belum capai 10 tahun. Oleh sebab itu, jika ingin melanjutkan jabatannya hingga 10 tahun harus melalui persetujuan lembaga pengusul lagi.

Saldi dan Enny merupakan hakim konstitusi yang diusulkan oleh presiden, sementara Suhartoyo diusulkan oleh Mahkamah Agung (MA).

“Kita minta sebelum dibawa ke pembahasan tingkat 2 (pengesahan), dibicarakan lagi,” ujar Mahfud.

Meskipun batal disahkan Selasa ini, revisi UU MK dikhawatirkan akan tetap menyandera hakim konstitusi. Revisi sewaktu-waktu dapat berjalan, terutama jika ada kebijakan atau putusan MK yang tidak menguntungkan kepentingan politik tertentu.

Peneliti Kemitraan yang juga anggota Tim Percepatan Reformasi Hukum pembentukan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Rifki Assegaf, membenarkan hal tersebut.

“Mengagendakan revisi macam ini saja sudah upaya menekan agar hakim-hakim MK tidak macam-macam,” kata Rifki.

Dalam kaitannya dengan revisi ini, sejumlah anggota Tim Percepatan Reformasi Hukum meminta agar revisi UU MK dihentikan dan dilanjutkan kembali sesuai pemilu.

Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran yang juga salah satu anggota Tim Percepatan Reformasi Hukum, Susi Dwi Harijanti, pemerintah tidak boleh mengambil kebijakan strategis di masa-masa menjelang pergantian penyelenggara negara. ●RDO





“Karena jika semua ditumpuk di tahun 2024, maka beban APBD 2024 akan sangat berat, karena itu dicadangkan 40 persennya di tahun 2023”

Suhajar Diantoro

ANGGARAN PILKADA BELUM AMAN

Kementerian Dalam Negeri terus mengingatkan pemerintah daerah agar segera menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Penyelesaian itu penting untuk memastikan kebutuhan anggaran Pilkada Serentak 2024 terpenuhi.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan, UU 10/2016 tentang Pilkada telah jelas mengatur bahwa anggaran Pilkada bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu meliputi kebutuhan anggaran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah, Linmas, dan aparat keamanan Polri/TNI.

“Kita akan mendorong rekan-rekan kepala daerah untuk melakukan koordinasi dengan KPUD, Bawaslu daerah, TNI dan Polri untuk menghitung kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan, pengawasan, dan pengamanan,” kata Tito pada Rapat Koordinasi Persiapan Pendanaan Pilkada dan Penandatanganan NPHD secara virtual, Selasa, 5 Desember 2023.

Mendagri juga menekankan agar anggaran yang telah disepakati bersama melalui NPHD dapat disalurkan sebanyak 40 persen dari APBD 2023 dan 60 persen APBD 2024. Mendagri telah mengingatkan kepala daerah mengenai persentase penyaluran anggaran tersebut sejak 24 Januari 2023 melalui surat edaran. Karena itu, mestinya Pemda telah mempersiapkannya.

“Kalau ada yang belum mengajukan KPU (maupun) Bawaslu segera minta untuk mengajukan, jangan sampai mendadak kemudian dibebankan di tahun 2024, padahal uangnya tidak ada,” ujarnya.

Dia menjelaskan, Kemendagri telah menyisir kondisi keuangan seluruh daerah dalam mendukung Pilkada 2024. Sebanyak 545 daerah bakal melaksanakan Pilkada, termasuk di antaranya 4 daerah otonom baru (DOB) Papua. Namun, pembiayaan Pilkada di 4 DOB tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, sebanyak 541 daerah pelaksanaan Pilkadaanya didukung oleh APBD.

Mendagri mengatakan, berdasarkan data per 4 Desember 2023, dari 541 daerah tersebut, sebanyak 480 daerah telah menandatangani NPHD dengan KPUD. Sementara yang

telah menandatangani NPHD dengan Bawaslu sebanyak 432 daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum semua daerah menyelesaikan NPHD. Karena itu, dirinya meminta daerah yang belum menandatangani NPHD segera menyelesaikannya.

“Ini nanti kita akan lakukan rapat zoom meeting per region, nanti (daerah) bagian tengah dan bagian timur kita akan rapat khusus, khusus hari ini rapatnya memang dengan Aceh, Sumut, Sumbar, dan Jatim,” jelasnya.

Sebelumnya, Tito mendorong seluruh pemerintah daerah di Bengkulu segera menandatangani NPHD. Upaya ini perlu dilakukan untuk memastikan kebutuhan anggaran Pilkada Serentak 2024 di daerah tersebut terpenuhi.

Mendagri mengingatkan, penyelesaian penandatanganan NPHD ini juga telah diatur melalui Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tahun 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pilkada Tahun 2024 yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah. Dalam SE tersebut menegaskan alokasi anggaran Pilkada 2024 dibebankan pada APBD 2023 dan 2024.

Selain itu, SE tersebut juga menekankan agar Pemda berkoordinasi dengan Bawaslu daerah dan KPUD dalam mengajukan usulan kebutuhan anggaran Pilkada.

“Saya sudah mengeluarkan SE dari 24 Januari 2023, mengingatkan untuk segera melakukan komunikasi kepada jajaran KPUD (dan) Bawaslu daerah, Polri-TNI daerah masing-masing untuk menyepakati dan kemudian segera untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD,” kata

Mendagri pada Rapat Koordinasi Percepatan Penandatanganan NPHD Kegiatan Pilkada 2024 Provinsi Bengkulu secara virtual, Selasa, 28 November 2023.

Khusus untuk Provinsi Bengkulu, Mendagri menambahkan, sebanyak 3 daerah belum menandatangani NPHD dengan KPUD dan 5 daerah dengan Bawaslu. Dirinya meminta daerah yang belum menyelesaikan NPHD untuk segera berkoordinasi.

“Nah ini saya mohon untuk segera mungkin koordinasi, bagi yang sudah menandatangani NPHD terima kasih banyak dan segera kalau bisa 40 persen (disalurkan),” tegasnya.

Terkait dengan anggaran keamanan, Mendagri juga mengimbau agar Pemda berkoordinasi dengan jajaran keamanan di daerahnya masing-masing. Upaya ini penting dilakukan agar pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan baik.

“Tolong koordinasi dengan jajaran Polda dan Kodam, Korem, untuk mengajukan anggaran pengamanan dan setelah itu dievaluasi, duduk bersama, ketemu angka yang sesuai dan setelah itu segera tanda tangani juga NPHD,” tegasnya.

Tito juga meminta pemerintah daerah di Provinsi Riau segera mempercepat realisasi penandatanganan NPHD. Mendagri menyoroti 5 kabupaten di Provinsi Riau yang belum melakukan penandatanganan NPHD baik dengan KPUD maupun Bawaslu daerah. Mereka di antaranya Kabupaten Bengkalis, Pelalawan, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, dan Kuantan Singingi.

“Saya minta semua daerah termasuk Riau, ini kami plotot, yang mana yang sudah melaksanakan NPHD, mana yang belum, NPHD-nya yang mana kepada Komisi Pemilihan Umum saja atau Badan Pengawas Pemilu atau sudah menyertakan TNI-Polri,” imbuhnya.

Mendagri menerangkan,

dasar data yang dikantonginya sebanyak 8 daerah termasuk provinsi di daerah tersebut telah menyelesaikan penandatanganan NPHD dengan KPUD maupun Bawaslu daerah. “Untuk daerah yang sudah menandatangani NPHD tolong untuk segera di follow up 40 persen ditransfer kepada penerima hibah, nanti sisanya 60 persen tahun depan, untuk yang belum segera koordinasi KPUD, Bawaslu, dan Polri-TNI,” terangnya.

Mendagri juga mengingatkan daerah yang belum menyelesaikan NPHD agar segera berkoordinasi dengan KPUD, Bawaslu daerah, maupun pihak keamanan. Koordinasi ini dilakukan agar mereka segera mengajukan usulan anggaran kebutuhan Pilkada 2024.

“Kalau seandainya sudah ada besaran disepakati segera ditandatangani NPHD, kalau sudah ditandatangani NPHD-nya, realisasikan yang 40 persen segera dalam waktu 14 hari setelah ditandatangani,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro, juga meminta seluruh Sekretaris Daerah mendukung penyediaan anggaran Pilkada Serentak 2024 terpenuhi. Hal itu ditegaskannya pada acara Pengukuhan Pengurus Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Komisariat Wilayah (Komwil) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2023 di Kota Pekanbaru, Riau, Jumat, 24 November 2023.

Dia mengatakan, Mendagri telah mengarahkan agar seluruh daerah mencaangkan anggaran Pilkada 2024 melalui APBD 2023 dan 2024. “Karena jika semua ditumpuk di tahun 2024 maka beban APBD Tahun Anggaran 2024 akan sangat berat, karena itu dicadangkan 40 persennya di tahun 2023,” terang Suhajar.

Suhajar menegaskan, sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berperan penting dalam memastikan ketersediaan anggaran Pilkada 2024 terpenuhi. Hingga saat ini Kemendagri juga terus mendorong pemerintah daerah menyelesaikan penandatanganan NPHD untuk Pilkada.

“Jadi rapat kemarin yang dipimpin oleh Bapak Mendagri bahwa NPHD belum di semua daerah, karena itu Pak Mendagri berpesan untuk memastikan kesediaan anggaran,” ujarnya.

Di lain sisi, Suhajar juga menyinggung pentingnya menjaga netralitas aparat sipil negara (ASN) menjelang Pemilu dan Pilkada 2024. Dia menegaskan, netralitas ASN merupakan bagian dari budaya demokrasi. Aturan mengenai netralitas tersebut juga sudah dijelaskan diatur, sehingga harus dipatuhi.

Suhajar mengaku mengantongi data mengenai ASN yang tidak netral. Data tersebut menjadi acuan dalam memberikan kebijakan kepada yang bersangkutan, termasuk saat penunjukan pejabat kepala daerah. Bagi ASN yang tidak netral juga berpotensi dilaporkan kepada Bawaslu di daerah maupun pusat untuk ditindaklanjuti. •RDO



“Ujung tombak pengawasan ada pada teman-teman ada di provinsi dan kabupaten/kota. Tolong pahami betul pasal 280 Undang-undang 7 Tahun 2017 soal larangan dalam berkampanye”

Puadi



DANA KAMPANYE HARUS JELAS BUKAN DARI HAMBA ALLAH

Pelaksanaan dana kampanye pemilu menjadi salah satu fokus utama pengawasan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal itu diatur dalam Pasal 93 huruf D butir 5 UU 7/2017 tentang Pemilu.

“**D**alam UU Pemilu, tugas Bawaslu dalam hal mengawasi salah satunya adalah mengawasi pelaksanaan kampanye dan dana kampanye,” kata Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, saat menjadi narasumber dalam giat yang diadakan DPP Partai Golkar di Jakarta, Senin, 4 Desember 2023.

Menurut Bagja, fokus pengawasan Bawaslu dalam dana kampanye pemilu tersebut beberapa di antaranya adalah sumber dana kampanye yang tidak boleh melebihi batas.

Selain itu, dana kampanye tidak boleh bersumber dari penyumbang yang dilarang. Sumber dana kampanye tersebut juga harus dilaporkan penerimaan dan pengeluarannya dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

“Sumber dananya harus jelas dicantumkan dari siapa. Jangan sampai sumber dana kampanye ditulis berasal dari ‘hamba Allah!’” tegas Bagja.

Tidak hanya kebenaran dan kelengkapan juga kepatuhan laporan, Bagja juga mengingatkan audiens akan sanksi administratif yang bisa dijera kepada pasangan calon yang tidak patuh.

Dia mencontohkan, Pasal 338 ayat (3) UU 7/2017 tentang Pemilu dijelaskan, dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2);

Partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.

“Kalau nih misalnya, DPD Golkar Provinsi Banten tidak melaporkan LPPDK, maka tidak ditetapkan calegnya se-provinsi Banten,” tegasnya.

Sementara itu, setiap orang yang ingin menyumbangkan dana kampanye kepada pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024 dibatasi maksimal Rp2,5 miliar. Nominal tersebut merupakan batas maksimal yang berlaku bagi perseorangan seperti tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) PKPU 18/2023 tentang Dana Kampanye.

“Dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden yang berasal dari perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000 selama masa kampanye,” bunyi pasal 8 Ayat (1) PKPU 23/2023.

Dana kampanye yang dimaksud bisa berupa uang, barang atau jasa. Jika berbentuk uang, bisa dengan tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya, dan uang elektronik.

Orang yang ingin memberikan sumbangan dana kampanye kepada capres-cawapres juga harus menyertakan informasi identitas seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, usia, alamat, nomor telepon, NIK, NPWP, dan sumber uang.

Penyumbang dana kampanye juga harus menyertakan surat pernyataan bahwa sedang tidak menunggak pajak, tidak dalam keadaan pailit, tidak memberikan sumbangan hasil tindak pidana dan sumbangan tidak bersifat mengikat.

Apabila pasangan capres dan cawapres menerima sumbangan dana kampanye lebih dari Rp2,5 miliar dari satu orang, maka tidak boleh digunakan dan harus pula melaporkan kepada KPU.

Sementara itu, sumbangan dana kampanye berupa barang harus dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar. Bisa berupa barang berwujud dan tidak berwujud, b a - rang

bergerak dan tidak bergerak, serta dapat dikorversikan dalam bentuk uang.

Kemudian, sumbangan dana kampanye berupa jasa meliputi pelayanan atau pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain yang manfaatnya bisa dinikmati capres-cawapres dan bisa dikonversikan dalam bentuk uang.

Tekan Jumlah Pelanggaran

Anggota Bawaslu, Puadi, menyatakan, pihaknya terus berupaya menekan jumlah pelanggaran saat masa kampanye Pemilu 2024. Salah satu yang dilakukan Bawaslu adalah membentuk tim fasilitasi pengawasan kampanye.

Puadi mengatakan, untuk menunjang tim pengawasan kampanye, maka dia meminta jajaran Bawaslu di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memahami betul pasal 280 UU 7/2017. Menurutnya hal ini sangatlah penting karena memuat apa saja yang dilarang dalam tahapan kampanye Pemilu 2024.

“Ujung tombak pengawasan ada pada teman-teman ada di provinsi dan kabupaten/kota. Tolong pahami betul pasal 280 Undang-undang 7 Tahun 2017 soal larangan dalam berkampanye,” ungkap Puadi saat menutup Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilu Gelombang III di Nusa Dua, Denpasar, Jumat malam, 1 Desember 2023.

Koordinator divisi penanganan pelanggaran, data dan informasi Bawaslu ini menambahkan, pengawas harus responsive. Jika ada informasi awal yang masuk dari masyarakat, maka wajib ditelusuri oleh Bawaslu.

“Misal ada kiriman video atau foto yang diduga melanggar aturan kampanye, maka jawab saja terima kasih atas informasi awal, lalu akan segera kami telusuri. Setelah itu segera koordinasi untuk segera ambil tindakan yang tepat,” tuturnya.

Dikatakan Puadi, seluruh jajaran Bawaslu harus bisa menyusun laporan dan jawaban dalam persidangan. Karena Bawaslu menjadi salah satu lembaga yang dijadikan ujung tombak para peserta pemilu yang memperjuangkan keadilan pemilu.

“Pengawas pemilu harus terampil. Kita harus rajin untuk belajar. Bisa belajar melalui membaca buku atau bertanya langsung kepada para anggota Bawaslu yang terdahulu,” terangnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda, menyampaikan masyarakat harus cerdas dalam memilah informasi yang diterima agar tidak terkena hoaks. Khususnya saat tahapan kampanye, dia menyampaikan masyarakat perlu cek fakta atas setiap informasi yang datang.

Di masa kampanye, Herwyn melihat akan ada potensi pelanggaran seperti kampanye hitam, hoaks hingga disinformasi. Terlebih di jaman digitalisasi saat ini yang mana semua informasi semakin cepat tersebar.

“Diharapkan kita semua dalam menerima informasi kita saring dulu mana informasi yang bisa diteruskan, sudah tervalidasi kebenarannya mana yang harus berhenti di kita,” tegasnya.

Alangkah baiknya, kata dia, setiap peserta pemilu, baik eksekutif dan legislative, dapat berkampanye secara sehat, yaitu dengan edukasi politik. Sehingga dalam prosesnya masyarakat mendapatkan pengetahuan yang jelas terkait peserta pemilu yang tengah berkampanye.

“Kampanye itu kan pemberian informasi, melalui visi dan misi program dari peserta pemilu atau citra apa dia baik atau tidak. Kita harus lihat informasinya menyesatkan atau tidak,” kata dia.

Herwyn pun mengingatkan hal yang wajar jika terjadi keberagaman pilihan yang akan muncul dalam masyarakat. Namun, besar harapannya untuk mengawasi Pemilu bersama-sama dan tidak memutus tali persaudaraan yang ada. •RDO





“Jadi dalam posisi ini, KPU tidak mengurangi apapun terhadap porsi dan format debat, karena semuanya mengacu pada UU 7 (Tahun 2017) dan PKPU. Jadi kalau yang ada tudingan mengurangi, menghilangkan tidak benar”

August Mellaz

INFO
KPU

9

Minggu I • Desember 2023

DEBAT CAWAPRES BAKAL PANAS

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menetapkan bahwa debat calon presiden akan digelar tiga kali dan debat calon wakil presiden akan digelar dua kali. Namun dalam setiap gelarnya, setiap pasangan capres-cawapres harus hadir.

Format debat capres-cawapres itu menjadi sorotan karena KPU memutuskan pasangan capres dan cawapres selalu hadir bersama selama lima kali debat. Tidak ada debat terpisah khusus capres atau cawapres seperti sebelumnya.

Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, mengatakan debat capres-cawapres itu sudah sesuai dengan UU Pemilu dan Pasal 50 PKPU 15/2023. Hanya porsinya saja yang beda.

Dari total lima kali debat, para capres akan mendapatkan porsi lebih banyak di tiga debat. KPU memang memberi ruang debat untuk cawapres, tetapi capres tetap hadir. Hal tersebut berbeda dari format sebelumnya di mana capres tak dihadirkan saat para cawapres berdebat.

Perubahan format itu menimbulkan spekulasi publik ada campur tangan pemerintah dalam penyelenggaraan debat KPU. Hal ini bertalian dengan majunya putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres dalam Pilpres 2024.

Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik, juga mengatakan, proporsi bicara lebih banyak capres dari cawapres pada saat debat capres. Sebaliknya, saat debat cawapres, proporsi bicara cawapres akan lebih banyak dari capres.

“Di setiap debat, rencananya akan didampingi oleh pasangan masing-masing. Misalnya pada saat debat capres, aktor utamanya adalah capres itu sendiri dalam menyampaikan pendalaman materi visi, misi, dan program pencalonan. Dalam debat ini, cawapres hanya mendampingi saja,” ungkap Idham, Sabtu, 2 Desember 2023.

Idham memandang hal itu tidak bertentangan dengan UU. Dirinya

yakin pasangan capres-cawapres akan menerima hal tersebut. Sebab, merupakan sarana pendalaman visi misi dan program serta citra diri pasangan calon.

“Rencananya, KPU akan menawarkan demikian, saya sangat yakin para pasangan capres dan cawapres memahami betul tentang arti pemenuhan informasi publik berkenaan dengan visi misi program. Debat adalah sarana pendalaman visi misi dan program serta citra diri pasangan calon,” imbuhnya.

Adapun debat capres-cawapres akan dilaksanakan pada 12 Desember 2023, 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024.

Dalam debat pertama, tema yang diusung adalah hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Debat kedua bertema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional.

Debat ketiga memiliki tema ekonomi (kerakyatan dan digital), kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pangan, pajak (digital), keuangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur.

Debat keempat mengambil tema energi, SDA, SMN, pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria, dan masyarakat adat. Sedangkan, debat kelima mengambil tema teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan (post-covid society), dan ketenagakerjaan.

Idham juga merespons kabar soal usulan awal format debat capres-cawapres dari kubu pasangan nomor urut 01, Anies

Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).

Idham mengatakan koordinasi dengan tim kampanye tiap paslon berlangsung dinamis pada 29 November 2023, tanpa memberikan konfirmasi atau bantahan terkait isu terkait usulan dari pihak AMIN.

“Dalam rapat itu kan dinamis. Orang rapat itu kan bisa menyampaikan pendapatnya,” kata Idham di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 4 Desember 2023.

Idham menyebut tim kampanye atau paslon memang diperbolehkan memberi masukan. Namun, keputusan tetap berada di tangan KPU yang menerapkan legal framework dalam membuat sebuah keputusan.

“Yang jelas KPU itu dalam mengambil keputusan harus bersikap mandiri. Dalam pedoman teknis, jelas. Tim kampanye bisa menyampaikan masukan dan tanggapan,” ujarnya.

Idham mengungkapkan KPU akan melakukan rapat koordinasi dengan tim kampanye tiap paslon untuk yang kedua kalinya. Namun, dia belum bisa memberikan informasi kapan rapat tersebut akan digelar.

Sementara itu, Komisioner KPU, August Mellaz, membantah tuduhan KPU telah mengubah format debat dengan menghilangkan debat cawapres di Pilpres 2024.

“Jadi dalam posisi ini, KPU tidak mengurangi apapun terhadap porsi dan format debat, karena semuanya mengacu pada UU 7 (Tahun 2017) dan PKPU. Jadi kalau yang ada tudingan mengurangi, menghilangkan

tidak benar,” kata Mellaz.

Lebih lanjut, dia bicara perbandingan debat Pilpres 2019 dengan Pilpres 2024. Menurutnya, tak ada masalah soal posisi capres yang juga hadir saat debat cawapres, begitu pun sebaliknya.

“Sekarang kan kita merujuknya penjelasan UU Nomor 7, maka 3 kali untuk capres, 2 kali untuk cawapres. 2019 lalu itu pasangan calonnya juga datang, meskipun porsi yang harus di podium untuk perdebatan tentu pada saat yang ditentukan. Nah, sedangkan pendampingnya itu duduk di audiens. Hal-hal semacam itu nggak ada masalah,” imbuhnya.

Pengamat politik dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, melihat polemik tentang format debat di sebagian masyarakat merupakan residu dari proses pemilu yang diawali dengan sebuah kontroversi, yaitu adanya insentif yang dirasakan salah satu pasangan calon melalui putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia.

Putusan MK tentang batas usia memberi jalan bagi Gibran untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Padahal, pada Pemilu 2019, pelaksanaan debat juga tidak sejalan dengan UU Pemilu.

Pada UU Pemilu tertulis bahwa debat paslon dilaksanakan lima kali, yaitu tiga kali untuk capres dan dua kali untuk cawapres. Sementara, yang dilaksanakan di Pemilu 2019 adalah dua kali debat paslon, dua kali debat capres, dan satu kali debat cawapres.

Namun, setiap paslon di Pemilu 2019 tidak mempersoalkan modifikasi itu, dan ditambah lagi tidak ada keraguan di masyarakat.

“Kalau sekarang, Pemilu 2024, ada keraguan di masyarakat yang merupakan residu dari proses pencalonan yang kontroversial dengan melibatkan MK dan lalu ada putusan MKMK. Itu akan terus mewarnai dialektika pilpres dan tahapan-tahapan pemilu berikutnya. Jadi publik melihat dugaan ada keuntungan ataupun kerugian bagi pasangan calon tertentu dari format debat itu,” ujar Titi.

“Lalu, ketika disebut bahwa porsi cawapres lebih banyak saat debat cawapres, dan sebaliknya. Lebih banyak itu kan bisa 40: 60, 45:55? Itu yang bisa memicu spekulasi dan kontroversi baru di masyarakat karena lagi-lagi situasinya tidak sama,” sambungnya.

Titi menjelaskan, tidak masalah bagi capres dan cawapres datang bersamaan saat debat karena itu hanya lah persoalan teknis. Untuk itu, Titi mengatakan, KPU harus menempatkan diri secara proporsional, profesional, dan kredibel. Setiap keputusan yang dibuat harus solid dan ditopang oleh argumentasi hukum yang kokoh.

“Jangan sampai justru membuka ruang spekulasi dan blunder di masyarakat karena akan rentan dihubungkan dengan residu pencalonan yang pernah terjadi,” ujarnya. ●RDO





FIGUR MUDA UBAH DINAMIKA POLITIK KALBAR

Pertarungan sengit dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalimantan Barat (Kalbar), persaingan untuk merebut kursi Gubernur Kalbar pada tahun 2024 nampaknya akan menjadi semakin menarik dan kompleks.

Keberanian beberapa tokoh politik untuk bersaing di tengah ajang penuh prestise ini turut memengaruhi persaingan. Selain petahana Sutarmidji yang diperkirakan akan kembali mencalonkan diri, muncul pula sejumlah figur lain yang siap memasuki pertarungan politik tersebut.

Salah satu figur yang telah menyatakan kesiapannya untuk bertarung dalam Pilkada Kalbar 2024 adalah Maman Abdurrahman, seorang politisi muda yang telah meraih pengakuan nasional.

Keputusannya ini diumumkan setelah menerima rekomendasi dari rapat pimpinan daerah (Rapimda) Partai Golkar baru-baru ini.

“Saya sebagai kader Partai Golkar dan Ketua DPD 1 Partai Golkar Kalbar menyatakan siap. Dan kita akan menindaklanjuti keputusan atau rekomendasi dari Rapimda Partai Golkar Kalbar dan segala sesuatunya nanti kita persiapkan,” ungkap Maman, belum lama ini.

Maman menegaskan bahwa pemilihan Gubernur Kalbar menjadi harapan dari Partai Golkar, dan dengan posisinya sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Kalbar, dia berharap dapat memberikan kontribusi signifikan dalam kontestasi Pilgub Kalbar tahun 2024.

“Tentu semakin banyak kandidat, akan semakin baik dan positif. Agar masyarakat Kalbar bisa

punya beberapa pilihan dalam memilih calon kepala daerah, ini masih panjang,” katanya, menambahkan bahwa proses politik masih dinamis dan bahwa ia menghormati keputusan Rapimda.

Sebagai seorang bakal calon gubernur, Maman juga menyadari pentingnya memenuhi syarat, salah satunya adalah menjadi ketua partai. Oleh karena itu, dia menekankan perlunya sukses dalam pemilu legislatif sebagai langkah awal sebelum fokus pada Pilkada.

Dukungan dari organisasi Perempuan Partai Golkar (KPPG) serta sayap dan ormas partai Golkar lainnya turut menguatkan langkah politik Maman Abdurrahman dalam menjalani arena politik yang penuh tantangan ini.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) juga memberikan mandat penuh kepada Maman untuk menentukan Calon Wakil Gubernur yang akan mendampinginya.

Maman mengklaim bahwa suara dari berbagai lapisan masyarakat ini memotivasi dirinya untuk memenuhi harapan yang diberikan oleh masyarakat Kalbar.

Dia menambahkan bahwa dukungan yang besar ini bukan hanya dari kader Partai Golkar, melainkan juga dari berbagai elemen masyarakat yang menginginkan kemajuan bagi daerah asalnya.

“Dukungan besar datang bukan hanya dari kader Partai

Golkar, melainkan juga dari berbagai elemen masyarakat yang menginginkan kemajuan bagi daerah asalnya,” sambung Maman.

Lebih lanjut, Maman mendorong agar Pilkada Provinsi Kalbar 2024 diwarnai oleh perdebatan konstruktif yang membahas kemajuan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dia menekankan bahwa masyarakat Kalbar telah semakin cerdas dan dewasa dalam berdemokrasi serta menentukan pilihan.

“Fokus utama kami adalah meningkatkan perolehan suara dan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalbar. Kemenangan di Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) di Provinsi Kalbar akan sejalan dengan keberhasilan Pilkada mendatang,” tegasnya.

Pengamat Politik Kalbar, Ireng Maulana MA menyatakan, bahwa kehadiran Maman Abdurrahman sebagai calon dalam Pilgub Kalbar membawa nuansa baru dalam peta politik daerah tersebut.

Ireng Maulana menekankan bahwa a

Maman Abdurrahman perlu menunjukkan ide dan gagasannya untuk memajukan Kalbar. Hal ini dianggap penting untuk mengatasi persoalan politik identitas yang sering muncul dalam Pilkada Kalbar.

Ireng Maulana menyatakan bahwa tanpa ide yang jelas, kemunculan Maman Abdurrahman mungkin akan terasa biasa.

Ireng Maulana menganggap keputusan Partai Golkar Kalbar untuk mengusulkan Maman Abdurrahman sebagai calon gubernur sebagai langkah berani dan penting.

“Kemunculan Maman menambah opsi politik baru bagi masyarakat yang mungkin bosan dengan profil kandidat yang sudah dikenal,” katanya.

Dalam analisisnya, Ireng Maulana menyebut bahwa kehadiran Maman Abdurrahman dapat mengubah dinamika politik di Kalbar dengan membawa narasi dan wacana yang berbeda.

Menurutnya, Maman, yang jauh lebih muda, memiliki potensi untuk membawa gagasan yang lebih segar dan menarik daripada dua kandidat utama yang cenderung berfokus pada isu infrastruktur.

“Partai Golkar Kalbar, yang dulunya memiliki akar kuat di banyak wilayah, kini mengalami kehilangan keterhubungan dengan masyarakat. Oleh karena itu, Maman perlu bekerja keras untuk mendekatkan partainya dengan masyarakat dan membuktikan bahwa Golkar masih relevan dan dapat diandalkan untuk kepentingan publik,” bebernya.

Ketua Harian DPD II Partai Golkar Kota Pontianak, Bebby Nailufa, menyatakan bahwa keputusan partainya untuk mengusung Maman sebagai Calon Gubernur Kalbar merupakan jawaban atas aspirasi dan harapan masyarakat Kalbar. Bebby menekankan bahwa masyarakat menginginkan perubahan dan memerlukan pemimpin yang tidak memihak pada etnis atau agama tertentu.

Bebby menambahkan bahwa Maman adalah sosok muda yang dianggap memiliki visi, gagasan, dan ketegasan dalam menjalankan tugasnya.

“Warga Kalbar berharap agar pemimpin muda ini dapat memaksimalkan potensi pembangunan dan mampu mengakomodir kepentingan bersama,” tambahnya.

Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Provinsi Kalbar, Haryadi Zuriansyah, menegaskan komitmennya untuk mendukung keputusan Rapimda dan Rak-erda Partai Golkar Provinsi Kalbar.

Haryadi berjanji untuk memobilisasi semua generasi muda di Provinsi Kalbar guna mendukung Maman sebagai Calon Gubernur.

“Sementara kami fokus pada upaya kemenangan Partai Golkar di Pileg dan Pilpres 2024, namun, keputusan mengenai Calon Gubernur Kalbar dari Partai Golkar akan kami sosialisasikan bersama. Terlebih lagi, mengingat calon yang diusung merupakan sosok pemimpin muda,” ujar Haryadi. • IRY





“Masyarakat Maluku menginginkan program Cagub dan Cawagub yang fokus pada masalah ekonomi, misalnya menciptakan lapangan pekerjaan, mengendalikan inflasi dan pemenuhan kebutuhan pokok”

Adjie Alfaraby

PESONA PETAHANA DI MALUKU MEREDUP

Hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI) ini telah menunjukkan perubahan signifikan dalam elektabilitas calon petahana Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Barnabas Orno, menjelang Pilkada Maluku 2024.

Mereka sekarang diungguli oleh Jefry Apoly Rahawarin (JAR), seorang calon penantang.

Direktur Konsultan Citra Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia (KCL LSI), Denny JA, Adjie Alfaraby menjelaskan, bahwa pesona Murad Ismail sebagai petahana telah meredup karena tingkat kepuasan publik yang rendah terhadap kinerjanya sebagai gubernur dan persepsi bahwa beliau gagal dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu poin kritik utama adalah status Maluku sebagai provinsi termiskin nomor empat di Indonesia, yang mayoritas responden tidak ingin melihatnya memegang jabatan Gubernur Maluku lagi.

Adjie Alfaraby menekankan bahwa hasil survei ini adalah data yang mencerminkan situasi di lapangan dan dapat menjadi referensi bagi masyarakat Maluku.

“Data ini cukup mengejutkan dan berpotensi menjadi isu yang menarik perhatian publik di Maluku terkait Pilkada 2024,” ungkapnya.

Menurutnya, elektabilitas Murad Ismail saat ini berada di level 18,4 persen, sementara JAR memimpin dengan 18,7 persen.

Ini menciptakan pertarungan “Head to Head” yang menarik antara kedua tokoh ini dalam Pilkada Maluku 2024. Adjie juga mencatat bahwa petahana yang memiliki elektabilitas di bawah 30 persen memiliki potensi besar untuk kalah dalam pemilihan gubernur yang besar.

LSI melakukan survei ini dengan wawancara tatap muka dengan margin of error sekitar 3,5 persen kepada 800 responden dalam rentang waktu dari 13 Juni hingga 1 Juli 2023,” ulasnya.

Dalam survei ini, responden lebih banyak memilih JAR daripada Murad Ismail, menciptakan persaingan ketat di antara keduanya.

Hasil survei ini menyoroti peran penting isu ekonomi dalam Pilkada Maluku 2024 dan potensi perubahan signifikan dalam elektabilitas calon petahana berdasarkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja mereka.

Adjie Alfaraby, telah mengungkapkan bahwa isu ekonomi menjadi prioritas utama bagi masyarakat Maluku dalam Pilkada Gubernur 2024, berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 800 responden.

Masyarakat di Maluku sangat menginginkan program-program dari calon Gubernur atau Wakil Gubernur yang berfokus pada masalah ekonomi, seperti menciptakan lapangan pekerjaan, mengendalikan inflasi, dan memenuhi kebutuhan pokok.

“Masyarakat Maluku menginginkan program Cagub dan Cawagub yang fokus pada masalah ekonomi, misalnya menciptakan lapangan pekerjaan, mengendalikan inflasi dan pemenuhan kebutuhan pokok,” jelasnya.

Hanya saja Murad Ismail tetap dianggap kuat sebagai incumben untuk Pilgub 2024. Pasangannya, Barnabas Orno, juga dianggap mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Wakil Gubernur.

Oleh karena itu, banyak yang menyarankan agar keduanya berpasangan kembali di Pilgub 2024.

Namun, meskipun Murad Ismail telah dikeluarkan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partainya sebelumnya, ia masih memiliki peluang besar untuk terpilih kembali pada Pilgub 2024.

Menurut Johan Tehuayo, seorang akademisi dari FISIP Universitas Pattimura Ambon, status sebagai incumben membuat Murad tetap kuat dalam persaingan.

Dikeluarkannya Murad Ismail dari PDIP terjadi karena istrinya, Widya Murad Ismail, memilih Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai kendaraan politik untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

“Ini adalah konsekuensi politik dan keputusan yang wajar sesuai dengan mekanisme internal PDIP,” ulasnya.

Meskipun keluarnya Murad dari PDIP berdampak pada kelembagaan partai tersebut yang dipimpin oleh Benhur Watubun, yang relatif lebih muda dalam hal popularitas dibandingkan dengan Murad Ismail, Murad tetap memiliki pengaruh signifikan di Maluku sejak Pemilihan Gubernur Maluku tahun 2019.

Dia telah memainkan peran penting dalam mempertahankan kekuatan PDIP di beberapa daerah, seperti Buru Selatan dan Kabupaten Kepulauan Aru.

Johan Tehuayo juga menekankan bahwa elektabilitas Murad Ismail masih tinggi dibandingkan dengan figur-figur lain di Maluku.

Selain PAN, partai lain seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) juga memiliki peluang memberikan rekomendasi kepada Murad sebagai calon gubernur.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagai partai Islam dan nasionalis, juga diharapkan mendukung Murad Ismail.

“Jadi, meskipun PDIP tidak lagi memberikan rekomendasi, Murad masih dianggap kuat dalam persaingan politik di Maluku,” tambahnya.

Sementara itu, pengamat lainnya, Said Lestaluhu, menyoroti dampak keluarnya Murad Ismail dari PDIP pada upaya partai tersebut dalam Pemilu 2024. Menurutnya, PDIP memerlukan pemimpin yang bisa mengakomodasi berbagai fraksi internalnya. Dengan Murad yang tidak lagi memimpin PDIP, Said khawatir ego-ego faksi akan kembali muncul dan dapat merugikan partai.

Selain itu, kepergian Murad dan Widya dari PDIP berarti bahwa suara dari basis pemilih Muslim juga akan hilang. Ini memungkinkan partai-partai politik lain, terutama Golkar, untuk mendapatkan dukungan lebih besar dalam Pemilu 2024.

“Golkar, yang merupakan pesaing terdekat PDIP di Maluku, memiliki peluang untuk memanfaatkan situasi ini untuk memaksimalkan dukungan dan meraih kembali kursi di DPR RI, kursi Gubernur Maluku, serta kursi Bupati dan Walikota,” pungkasnya.

• IRY



“Kita juga diberi tugas untuk mensosialisasikan diri sesuai dengan nomor urut di tingkatan masyarakat dan berkolaborasi dalam tugas-tugas untuk mendapatkan dukungan sebanyak mungkin”

Tatong Bara



CALEG MUDA GIAT BERTARUNG TARIK PERHATIAN MILENIAL

Politisi muda sedang giat bertarung dalam Pemilihan Legislatif 2024, termasuk di wilayah Sulawesi Utara (Sulut). Mereka didorong oleh partai untuk menarik perhatian pemilih milenial dan generasi Z.

Salah satu dari mereka adalah Risal Faisal Pou, calon legislatif (caleg) muda yang berambisi berkontribusi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara. Ia mencalonkan diri dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) di Daerah Pemilihan (Dapil) IV Sulawesi Utara, khususnya Bolaang Mongondow Raya (BMR).

Risal Pou, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum BSG City Official, menyatakan bahwa keputusannya untuk mencalonkan diri di Dapil IV Sulawesi Utara adalah upaya untuk memperkuat posisi NasDem di Bolaang Mongondow Raya.

Ia berharap dapat membawa NasDem menjadi kekuatan yang lebih besar di wilayah tersebut. Selain itu, Risal Pou ingin berkontribusi dalam memajukan daerahnya dengan memanfaatkan pengalaman yang telah ia kumpulkan selama ini.

“Saya ingin berkontribusi dalam memajukan daerah dengan memanfaatkan pengalaman yang saya kumpulkan selama ini,” ungkapnya, belum lama ini.

Pemilihan Risal Pou di Dapil IV Sulawesi Utara juga didorong oleh kedekatannya dengan masyarakat Bolaang Mongondow Raya.

Ia memilih untuk fokus di Tanah Totabuan, menunjukkan komitmen untuk melayani dan membangun daerah tersebut.

“Permintaan untuk berkiprah di BMR tidak hanya datang dari teman-teman dan masyarakat setempat, tetapi juga dari tokoh-tokoh masyarakat di daerah tersebut maupun di luar daerah,” ungkapnya.

Risal Pou menyadari tanggung jawab besar yang diembannya dan menganggap dukungan yang diterimanya sebagai amanah untuk memajukan daerahnya.

Meskipun ini kali pertamanya mencalonkan diri di DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Risal Pou bukanlah sosok baru dalam dunia politik. Ia telah aktif selama 5 tahun, terutama dalam mendukung pertumbuhan partainya.

Meskipun usianya relatif muda untuk dunia legislatif di tingkat provinsi, Risal Pou meyakinkan bahwa relasinya yang luas dan perannya sebagai Ketua Umum komunitas anak muda memberikan kontribusi nyata dalam membangun Sulawesi Utara.

Ia merasakan dukungan yang besar

dari masyarakat setiap kali mengunjungi berbagai daerah, dan melihat antusiasme mereka sebagai harapan besar terhadap pemimpin yang benar-benar memperjuangkan aspirasi mereka.

“Saya juga merasakan dukungan yang besar dari masyarakat setiap kali mengunjungi berbagai daerah dan melihat antusiasme mereka sebagai harapan besar,” tambahnya.

Risal Pou juga menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia dan potensi pariwisata dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian daerah.

Ia percaya bahwa penanganan serius terhadap sumber daya manusia dapat membawa dampak positif terhadap kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Selain itu, pengelolaan potensi pariwisata dengan baik dapat menjadi sumber pendapatan signifikan dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat.

Dengan dukungan kuat dari keluarga, partai, kerabat, rekan bisnis, dan masyarakat, Risal Pou berharap dapat menjadi salah satu pemenang dalam Pemilu Legislatif 2024. Ia berkomitmen untuk mewujudkan harapan dan aspirasi bersama demi kemajuan daerahnya, termasuk dalam hal pengembangan sumber daya manusia dan potensi pariwisata.

Risal Faisal Pou merupakan anak muda yang lahir di Gorontalo, 11 April 1997 dengan organisasi, KNPI Kabupaten Gorontalo 2017-2018, LSM Gorontalo 2017-2019, Kadin Gorontalo 2017-2018 dan Ketua Komunitas BSG City 2022-Sekarang

Dalam proses konsolidasi caleg di Sulawesi Utara, Partai NasDem telah mematangkan kesiapan para caleg dengan mengadopsi metode kolaborasi yang sesuai dengan pembagian

wilayah kerja prioritas (WKP) dan Wilayah Kerja Independen (WKI).

Wakil Ketua Dewan Pakar DPW Partai NasDem Sulawesi Utara, Tatong Bara mengungkapkan, bahwa para caleg NasDem tidak hanya terpaku pada wilayah kerja prioritas, tetapi juga diberikan keleluasaan untuk mencapai kesuksesan bersama.

“Istilahnya WKI, jika kita memiliki kawan atau keluarga, kita da-

pat bergerak bebas di seluruh Sulut. Kita juga diberi tugas untuk mensosialisasikan diri sesuai dengan nomor urut di tingkatan masyarakat. Selanjutnya, kita mencoba berkolaborasi dalam tugas-tugas untuk mendapatkan dukungan sebanyak mungkin,” jelas Tatong Bara.

Tatong Bara melanjutkan bahwa seluruh caleg di Sulawesi Utara mendapatkan panduan terkait sosialisasi dan aktivitas caleg, serta bagaimana kolaborasi antara caleg DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Sebagai contoh, saya sebagai nomor urut 1 di Bolmong Raya, Mitra, Manado, dan Minut. Beberapa di antaranya melakukan kolaborasi dengan caleg DPRD Provinsi di bawah DPR-RI. Dengan begitu, wilayah kerja prioritas caleg DPR-RI nomor urut 1 akan terlihat,” ungkapnya, menjelaskan bahwa hal ini juga berlaku untuk seluruh tingkatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Lebih lanjut, Tatong Bara memberikan contoh konkret, yaitu Wakil Ketua DPRD Kota Manado, Kakak Adrey Laikun, yang merupakan caleg DPRD Kota Manado dan menjadi mitra kolaborasi di wilayah kerja prioritas, khususnya di dapil Tuminting, Bunaken, dan Bunaken Kepulauan.

“Saya dapat bekerja sama dengan baik, baik dalam hal logistik maupun sosialisasi di masyarakat. Insyaallah, kerjasama ini akan berlanjut hingga Kakak Adrey meraih suara besar, dan DPR-RI juga meraih dukungan yang signifikan,” tambahnya.

Selain sebagai incumbent, Kakak Adrey Laikun juga merupakan pendulang suara terbanyak dan menjadi aset berharga bagi Partai NasDem. ● IRY





“Dibutuhkan usaha ekstra dari bacaleg baru tersebut untuk meyakinkan calon pemilih pemula dan pemilih nonpemula yang ingin mereka tarik sebagai pemilih konkret dalam kontestasi mendatang”

Agus Suriadi

INFO
CALEG

Minggu 1 • Desember 2023

13

SERING BACA KORAN, AKHIRNYA TERPAPAR POLITIK

William Aditya Sarana, seorang tokoh Generasi Z, tengah berjuang sebagai calon anggota legislatif (Caleg) DPRD DKI Jakarta dalam Pemilu 2024. Ia berbagi pengalaman mendaftar sebagai caleg ketika masih menjalani kuliah pada tahun 2019.

William, yang kini merupakan calon petahana di DPRD DKI, telah menjadi anggota legislatif termuda di DPRD DKI pada usia 23 tahun pada tahun 2019.

Pengenalan William terhadap dunia politik bermula saat ia masih bersekolah di SMA dan melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dengan konsentrasi Hukum Tata Negara.

“Pertama kali tertarik pada dunia politik ketika masih SMA dan membaca koran secara rutin. Saya selalu membaca koran selama jam istirahat. Itu merupakan paparan awal saya terhadap politik sebelum melanjutkan ke Kampus,” ujar William.

Meskipun menjadi caleg dari PSI di Dapil 9 (Tambora, Kalideres, Cengkareng), William tidak setuju dengan pandangan bahwa terlibat dalam politik memerlukan usia yang ‘tua.’

Baginya, Generasi Z atau kaum muda tidak boleh diabaikan dalam dunia politik, terutama dalam konteks Pemilu.

“Pandangan bahwa politik hanya untuk mereka yang ‘berumur’ memang ada, tetapi tidaklah signifikan. Itu adalah pandangan lama. Pemilu 2019 atau 2024 akan ditentukan oleh partisipasi pemilih muda. Tidak ada yang bisa meremehkan peran anak muda dalam politik. Mereka merupakan 60 persen dari populasi Indonesia, dan 41 tahun ke bawah,” tandasnya.

William mencatatkan dirinya sebagai anggota legislatif termuda di DPRD DKI.

Pada bulan Oktober 2019, ketika baru menjabat sebagai Anggota DPRD DKI, William menciptakan kehebohan di kalangan publik dengan mengungkapkan rencana anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dianggap tidak wajar.

William membeberkan rincian anggaran untuk ‘lem Aibon’ senilai Rp 82,8 miliar.

William membagikan tangkapan layar situs apbd.jakarta.go.id di media sosial. Dalam anggaran tersebut, Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat dideskripsikan menganggarkan dana sebesar Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem Aibon, yang disebut sebagai bagian dari Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri.

Sementara William Aditya Sarana,

memberikan saran kepada generasi Z atau anak muda yang berkeinginan untuk sukses dalam pemilihan legislatif (Pileg). Ia menyarankan agar generasi Z memulai karir politik mereka di lingkup DPRD sebagai langkah awal.

William berharap agar semakin banyak anak muda yang terlibat dalam kegiatan legislatif.

“Tips dari saya untuk anak muda, mulailah dari bawah, dari DPRD. Karena DPRD ini memiliki cakupan yang tidak terlalu besar,” ujarnya.

Dengan fokus yang tidak terlalu besar di DPRD, anak muda dapat mengurangi biaya politik mereka, dan peluang untuk meraih kemenangan pun menjadi lebih besar.

“Jika mereka memiliki banyak teman di daerah pemilihan (Dapil), mereka dapat mengurangi biaya politiknya. Karena kelemahan anak muda biasanya terletak pada keterbatasan dana dan pengalaman. Untuk mengurangi biaya politik, mereka sebaiknya mencalonkan diri di Dapil yang tidak terlalu besar dan memiliki banyak teman di sana, sehingga peluang terpilih lebih besar,” ungkapnya.

William juga menggambarkan politik sebagai lari maraton, sebuah kegiatan yang membutuhkan ketahanan dan tenaga.

“Dalam politik, ini seperti lari maraton, bukan sprint singkat. Perubahan dalam politik memerlukan waktu yang panjang. Jadi, bagi anak muda yang terlibat dalam politik, penting untuk mempersiapkan stamina agar dapat bertahan dalam perjalanan panjang ini,” tambahnya.

Selain itu, William menyoroti pentingnya kampanye di media sosial. Meskipun media konvensional masih menjadi pilihan utama masyarakat, ia menekankan bahwa media sosial terus

berkembang pesat.

“Data menunjukkan bahwa di Indonesia, televisi masih menjadi nomor satu, diikuti oleh spanduk dan baliho. Media sosial menempati urutan ketiga. Meskipun masih konvensional, media sosial terus berkembang,” katanya.

Secara pribadi, William lebih memilih fokus pada kampanye di media sosial. Dia menekankan perlunya pendekatan yang berbeda untuk setiap platform media sosial, seperti Instagram, TikTok, dan Facebook.

book, karena pengguna di setiap platform tersebut memiliki karakteristik yang berbeda.

William juga mencatat keberhasilan kampanye di TikTok, seperti terpilihnya Bongbong Marcos sebagai Presiden Filipina pada tahun 2022.

“TikTok merupakan hal baru dalam politik. Ini perlu diperhatikan karena ada contoh presiden terpilih di Filipina yang berhasil meraih dukungan generasi Z melalui TikTok,” jelasnya.

Sementara pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Agus Suriadi menambahkan fenomena kader atau bakal calon legislatif (bacaleg) muda sebenarnya telah menjadi sorotan sejak Pemilu 2019.

Meski demikian, perjalanan mereka dalam dunia politik masih jauh tertinggal dibandingkan dengan para senior mereka.

“Pada dasarnya, secara politik dan pengetahuan, mereka belum sepenuhnya teruji. Pemilih muda saat ini dapat menjadi acuan bagi bacaleg muda, mengingat tren segmen pasar politik pemilih pemula merupakan keuntungan tersendiri bagi mereka,” ujarnya.

Menurut Agus, meskipun pengalaman dan perjalanan mereka sejak tahun 2019 dianggap masih kurang matang, potensi munculnya pemilih pemula dapat menjadi keuntungan bagi bacaleg milenial, termasuk para bacaleg baru yang akan menantang dalam Pemilihan Legislatif 2024 mendatang.

“Oleh karena itu, dibutuhkan usaha ekstra dari bacaleg baru tersebut untuk meyakinkan calon pemilih pemula dan pemilih nonpemula yang ingin mereka tarik sebagai pemilih konkret dalam kontestasi mendatang,” jelasnya. •IRY





PDI PERJUANGAN

H. GIRI RAMANDA N KIEMAS, S.E., M.M
NO. URUT 1 DAPIL 2 SUMSEL

YAKIN BISA MENCAPAI TARGET

Hasil pemilu sebelumnya menjadi motivasi PDI Perjuangan Sumatera Selatan untuk meraih hasil maksimal di Pil-pres dan Pileg 2024.



“Suara Ganjar Pranowo ternyata lebih disukai masyarakat Sumsel daripada Jokowi di Pemilu 2014. Sehingga ada potensi kesukaannya lebih besar”

Giri Ramanda Kiemas

Hasil Pemilu sebelumnya menjadi motivasi PDI Perjuangan Sumatera Selatan untuk meraih hasil maksimal di Pilpres dan Pilleg 2024. Meski targetnya cukup berat namun bukan misi yang mustahil bagi kader PDIP Sumsel untuk meraih kemenangan 50 persen plus 1 di Pilpres 2024.

Berkekuatan empat partai yakni PDI Perjuangan, Perindo, PPP dan Hanura, yakin akan meraih target yang ditetapkan.

“Partai bergerak sendiri dan tim pemenang juga melakukan gerakannya. Kemudian disinkronkan dengan gerakannya para relawan. Itulah tugasnya tim pemenang daerah untuk mengharmonisasi antara gerakan partai dengan para relawan,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan, Giri Ramanda Kiemas.

Sebagai panglima utama PDI Perjuangan di Sumsel, Giri menargetkan meraih kemenangan 50 persen plus 1 untuk Ganjar – Mahfud. Target itu memang karena dalam perjalanan sejarah politik Sumatera Selatan PDIP kurang bersinar. Sehingga mencapai target tersebut tentu menjadi tantangan besar dan perlu menyinkronkan komunikasi antara partai, tim pemenang daerah dan para relawan.

Untuk itu perlu memaksimalkan semua potensi yang ada, salah satunya menghadirkan sosok Ganjar yang sangat disukai masyarakat Jawa di Sumsel. Kemudian resistensi Ganjar lebih kecil daripada saat PDIP mencalonkan Jokowi di Pilpres lalu.

“Sehingga saat tidak memilih Ganjar, mereka juga tidak mencela, tidak membenci. Jadi Ganjar itu lebih diterima masyarakat Sumatera Selatan daripada Jokowi meski saat ini masih butuh kerja keras untuk mencapai target 50 persen plus satu,” ungkap putra politisi kawakan Sumsel, Nazaruddin Kiemas ini.

Tantangan terberatnya lanjut Wakil Ketua DPRD Sumsel ini adalah mengubah persepsi dari masyarakat Sumatera Selatan yang sudah terbiasa memilih sosok kandidat lain seperti Prabowo. Dimana nama Prabowo sudah terbiasa di telinga warga Sumsel karena sudah tiga mencalonkan diri yakni 2009, 2014, dan Pilpres 2019.

Sehingga kader PDIP Sumsel akan mengenalkan sosok Ganjar

lebih besar lagi. Dimana ada banyak kelebihan dari Ganjar Pranowo ini, dia lebih humble, sederhana, berpengalaman serta lebih pintar. Prestasinya sudah jelas selama menjadi gubernur dua periode. Jadi menjualnya lebih mudah dibandingkan Jokowi yang saat itu baru dua tahun menjadi Gubernur DKI.

Di sisi lain PDI Perjuangan akan meng-



hadapi Partai Gerindra secara head to head karena sama-sama punya mesin yang besar serta sebagai pengusung.

Bangga Calonkan Ganjar

Sosok calon presiden sangat penting bagi partai pendukung sehingga bisa saling mempengaruhi perolehan suara partai bila memang pilihannya sesuai dengan selera. Di daerah lain mungkin sangat mempengaruhi namun di Sumsel hal itu tidak berlaku.

Hal ini dilihat dari pencalonan Jokowi di Sumsel. Dimana perolehan suara Jokowi tidak punya pengaruh bagi PDIP di Sumatera Selatan. Sehingga perolehan suara PDIP di Sumsel mengalami penurunan di 2019.

“Namun bagi kami kader PDIP, suatu kebanggaan mencalonkan Ganjar sebagai calon presiden karena dia adalah kader partai. Ada semangat tersendiri karena Ganjar adalah kader partai yang membangun sejak awal dan berjuang sejak awal. Nah itu semangatnya bagi kami di PDIP sekarang,” tegas pria yang di Pemilu 2024 ini akan membidik kursi DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Sumsel.

Namun apakah sosok Ganjar ini bisa memberikan efek positif bagi para kader partai, jawabannya bisa iya bisa juga tidak. Berpengaruh

atau tidak tergantung dari pendekatan para kader, bagaimana mereka melakukan sosialisasi. Hal ini bisa dilihat dari survey. Dimana dari hasil survey sosok Ganjar-Mahfud ini lebih dari partai. Sehingga PDIP juga harus kerja keras untuk memenangkan

semuanya.

Untuk itu PDIP Sumsel akan memaksimalkan mesin partai, baik itu untuk kemenangan Ganjar-Mahfud maupun di pemilihan legislatif. Di sisi lain ada juga para relawan yang secara khusus bergerak untuk memenangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

“Sekarang kita masih mendata jum-

lah organisasi relawan, menginventarisir kekuatannya, dimana saja serta apa saja yang sudah dilakukan. Sehingga saat bertempur di lapangan kita memberikan amunisinya yang tepat,” ujarnya.

Selama ini PDIP Sumsel juga punya basis-basis massa yang bisa dimaksimalkan seperti di wilayah Kabupaten OKI, Muara Enim, PALI, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Banyuasin. Basis ini masih terjaga kekuatannya hingga saat ini.

Sedangkan basis lain yang akan dimaksimalkan adalah wilayah Kabupaten OKU, OKU Timur, Lahat dan Kota Palembang. Untuk mencapai hal tersebut PDIP Sumsel terus melakukan perbaikan mulai dari kualitas kader, strategi dan lainnya. Sehingga di Pemilu 2024 ini suara PDIP bisa naik lagi.

Untuk target sendiri di Pemilu 2024 ini, Giri mengaku tidak muluk-muluk yakni bisa mengembalikan perolehan suara

di 2004 lalu sudah cukup.

Selain meraih kemenangan di Pilpres, PDIP Sumsel akan membidik empat kursi di DPR RI yakni dua kursi di Dapil 1 dan dua kursi di Dapil 2.

Untuk DPRD Sumsel, PDIP sempat meraup 26 kursi di Pemilu 1999 namun sekarang turun menjadi 13 kursi. Di Pemilu 2024 ini, PDIP Sumsel menargetkan meraih 15 hingga 17 kursi.

Kemudian untuk DPRD kabupaten/kota, PDIP Sumsel sempat meraup 150 kursi, turun menjadi 120 dan mendapat 90 kursi di Pemilu 2019.

“Harapannya di Pemilu 2024 ini kita kembali meraih 120 kursi lagi lah. Sehingga apakah hasil Pilpres juga akan ikut mempengaruhi, saya rasa tidak juga. Di tahun 2014, suara pak Jokowi di Sumsel mendapat 42 persen tapi suara partai hanya 14 hingga 15 persen saja,” ujarnya.

Sehingga besar tidaknya suara PDIP Sumatera Selatan tetap saja bergantung dari bergerak atau tidak para kader di lapangan serta pendekatannya ke masyarakat.

“Suara Ganjar Pranowo ternyata lebih disukai masyarakat Sumsel daripada Jokowi di Pemilu 2014. Sehingga ada potensi kesukaannya lebih besar. Kekuatan inilah yang akan dimaksimalkan kader PDIP Sumsel untuk meraih kemenangan di Pilpres 2024.

Mengincar Semua Kalangan

Guna mencapai target kemenangan 50 persen plus satu, PDIP Sumsel tidak akan memilah-milah suara. Semua digarap, mulai dari milenial, Gen Z, umum hingga suara kolonial pun akan mereka garap. Semua suara dianggap prioritas terutama dari kalangan pemilih pemula.

Meski secara karakteristik punya perbedaan namun secara potensial suara anak muda harus lebih maksimal digarap karena mereka punya masa depan yang panjang dalam menentukan arah demokrasi mendatang.

Di PDIP mereka punya sayap-sayap partai yang tujuannya untuk menggarap suara anak muda ini seperti Taruna Merah Putih yang tujuannya menggarap pemilih pemula. Ada Banteng Muda Indonesia (BMI) untuk suara kamu muda.

Selanjutnya ada wadah untuk kader garis keras dan kritis, mereka ini masuk di Relawan Perjuangan Demokrasi (RPD). Kemudian untuk kader yang suka dengan kegiatan religius, PDIP punya Baitul Muslimin.

Dari hasil survey yang dilakukan PDIP, karakter pemilih itu ada tiga yakni mereka memilih karena suka dengan partai (18 %). Memilih karena orangnya bukan partainya (14 %). Memilih karena partainya dan orangnya (lebih dari 50 %).

“Sehingga kalau ditanya perbedaannya di Pemilu 2024 ini mungkin soal ketokohnya yang mulai agak berkurang. Sehingga ada orang yang potensial dan bagus nih tapi dia gagal karena partainya tidak punya captive market yang tinggi,” terangnya.

Untuk mencapai target tersebut tidak bagaimana kerja keras dari para kader. Hasil survey hanya sebagai peringatan sesaat tapi bukan menentukan. Siapa yang kerja keras dan maksimal maka akan berhasil. RDR

“Kami sudah siap lahir batin, kalau kita sudah masuk ke dalam kesebelasan mau lawan siapa saja kami siap!”

Momon Wahyudi



SIAP LAHIR BATIN

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Selatan (Sumsel) menyatakan siap secara lahir dan batin untuk bertarung dan optimis menumbangkan semua lawan di Pemilu 2024 mulai dari pemilihan presiden hingga pemilihan legislatif.

Untuk mencapai target tersebut tentu para kader partai harus bekerja keras melakukan berbagai pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini pula yang dilakukan Momon Wahyudi, calon legislatif untuk DPR RI dari PKB.

“Kami sudah siap lahir batin, kalau kita sudah masuk kedalam kesebelasan mau lawan siapa saja kami siap! Walaupun lawan kita pernah menang piala dunia sekalipun kami tidak mundur kita siap lawan mereka,” kata Wakil Ketua DPW PKB Sumsel Momon Wahyudi.

Menurut Caleg Dapil Sumsel 1 ini, Timnas pemenang pasangan capres dan cawapres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) menargetkan 60 persen kemenangan AMIN di Sumsel.

“Ibarat kompetisi sepakbola kita adalah Timnas AMIN harus optimis bisa juara (menang Pilpres),” jelasnya lagi.

Terkait survei AMIN selalu berada di urutan terbawah itu bukan menjadi patokan akan finishing kepada kekalahan.

Dia mengibaratkan dalam pertandingan balap motor posisi terdepan tidak mungkin menang pertandingan karena kondisi apapun bisa terjadi di sebuah sirkuit Sentul.

“Survei kita terendah semua Timnas AMIN justru lebih semangat melihat itu, karena kami lebih termotivasi lagi untuk menyusul yang ada di depan. Ibarat balapan motor yang paling ingin kencang larinya itu di belakang karena terus semangat ingin mengejar. Nah biasanya sudah ada didepan mereka terlenta momen itulah baru kita menangkan pertandingan ini,” jelasnya.

Dia menyebutkan masih banyak waktu untuk mengejar yang didepan karena kerja-kerja politik Timnas AMIN sudah mulai mendongkrak elektabilitas paslon nomor 1.

Kalau dia memandang secara rasional

tidak hanya melihat hasil survei saja, berdasarkan berbagai aspek peluang kemenangan para paslon nomor urut 1, nomor urut 2 dan nomor urut 3 dinilaiimbang.

“Kalau kami lihat sebaliknya ketiga paslon ada peluang yang sama aliasimbang sama kuat. Jadi tidak menutup kemungkinan kita yang akan cross atau menyeberang ke finis,” tegasnya.

Semua paslon ingin menang dalam 1 putaran kompetisi Pilpres 2024, pihaknya AMIN memiliki harapan sama menang telak dan menang besar. Walaupun seandainya harus lanjut 2 putaran mereka juga tidak gentar mau menghadapi paslon nomor urut berapa saja.

“Cita-cita itu harus digantung setinggi langit jadi kalau jatuh tidak sakit karena kita jatuhnya di bintang-bintang. Artinya walaupun paslon lain mau menang 1 putaran kami juga optimis bisa menang 1 putaran juga,” terangnya.

Dia melihat iklim di Pilpres 2024 sudah mulai tenang dan terarah semua paslon mulai memberikan beragam gagasan yang jelas dan lebih dipahami masyarakat dibanding politik identitas.

Ketum PKB calon wakil Presiden Cak Imin di awal pidatonya saat pengambilan nomor urut 1 sudah berjanji tidak ada lagi yang namanya politik identitas kembali terulang itu-pun diikuti semua paslon lain.

“Tidak ada lagi politik identitas itu janji Cak Imin itu juga disepakati oleh paslon lain, sekarang politik gagasan. Gagasan itu bukan

sekedar jargon perubahan saja! Tetapi kami PKB mendukung kerja pemerintah sebelumnya kalau ada yang baik kita perbaiki lagi. Contoh Presiden Jokowi sudah baik melakukan pemerintah salah satunya mewujudkan swasembada pangan. Namun sistemnya sudah bagus hanya praktek dibawah yang tidak berjalan sesuai keinginan,” terang dia.

Di sisi lainnya dia mengimbau masyarakat untuk memilih secara cerdas khusus kelompok Gen Z dan Milenial tidak mendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kalau hanya alasannya atau dampak dari Gibran berumur lebih muda dibandingkan paslon lain.

“Calon yang lebih tua bukan berarti jiwa yang tidak muda malahan yang lebih tua lebih berjiwa muda dari yang berumur muda.

AMIN keduanya memiliki kegiatan atau aktivitas yang digemari oleh anak muda hobi mereka vespa. Walaupun umur muda kalau setiap hari di rumah saja tidak menyalurkan hobi anak muda juga juga mengerti jiwa anak muda dong,”ucapnya. Soal kerja mesin partai, PKB memberikan tar-

get kemenangan untuk AMIN 60 persen di Sumsel, pihaknya sudah melakukan kerja keras selama dimulainya kampanye. PKB menjadikan para caleg sebagai agen khusus untuk sosialisasi kemenangan AMIN dan semua alat kampanye diwajibkan menggunakan foto dan latar AMIN.

“Kita sudah lakukan upaya untuk para caleg bisa langsung berdialog kampanye AMIN sekaligus mereka juga melakukan sosialisasi diri. Nah setelah itu akan kita lihat sejauh mana dampaknya, soalnya masih banyak waktu dan kesempatan harus kita cermati semua pola dulu,” terangnya.

Dia sebagai Caleg DPR RI Dapil Sumsel 1 wilayah Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Lubuklinggau dan Musi Rawas Utara ini, juga ikut berdampak saat mengkampanyekan AMIN. Cak Imin di pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014 sangattlah berdampak baginya.

“Semua penduduk pedesaan di semua wilayah kenal dengan Cak Imin, Anies juga dikenal sangat ramah. Apa lagi di Sumsel masyarakatnya mayoritas religius jadi sangat gampang untuk mensosialisasikan AMIN dan saya sendiri sebagai Caleg,”jelasnya.

Dia juga berharap seandainya menang akan mencari komisi yang konsentrasi mengurus Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Karena dia terpanggil menjadi wakil rakyat tentunya terpikir untuk mengurus umat bukan hanya menjabat.

“Ada komisi sembilan yang mengurus seperti itu bahkan ikut membina dan memberikan pelatihan kepada rakyat. Nah saya senang kalau mengurus umat dibandingkan hanya program satu kali saja,” tuturnya.

Dia sendiri sebagai Ketua Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Bansor) Palembang engga memberikan suara untuk para kaum muda organisasi islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU) bergerak untuk mendukungnya sebagai caleg atau mendukung AMIN di Pilpres. Pasalnya Bansor dilarang melakukan praktek politik praktis karena akan mencoreng nama baik NU itu sendiri.

“Kalau saya bergerak di politik itu lebih kepada pribadi bukan sebagai Ketua Bansor Palembang. Bisa juga sebagai kader partai PKB untuk melakukan kerja politik. Tetapi Bansor dilarang untuk berpolitik karena menjaga netralitas pemilu jangan sampai mendukung pihak manapun,” pungkasnya. ●RDR





“Palestina adalah isu yang sangat seksi untuk dijadikan bahan politik di Pemilu, apalagi paslon-paslon di Pilpres 2024”

Bagindo Togar

ISU PALESTINA MAMPU TINGKATKAN ELEKTABILITAS

Konflik Palestina dan Israel menjadi perbincangan hangat di publik internasional termasuk di Indonesia. Menjelang Pemilu 2024 ini berbagai isu sosial dimanfaatkan semua peserta untuk meningkatkan elektabilitasnya mulai dari agama, kemanusiaan dan politik antar negara.

Permasalahan atau konflik Palestina menjadi salah satu potensi untuk meraih simpati baik di Pilpres dan pemilihan legislatif saat ini.

Pengamat politik Sumsel Bagindo Togar Butar menyebutkan isu Palestina menjadi isu potensial dan memang layak untuk dibawa dan digaungkan di Pemilu khususnya di Pilpres 2024.

“Palestina adalah isu yang sangat seksi untuk dijadikan bahan politik di Pemilu apa lagi paslon-paslon di Pilpres 2024. Bahkan isu Palestina bisa menaikkan elektabilitas para paslon tersebut,” kata dia.

Dia mencermati hanya paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sangat cermat menggunakan isu Palestina, dibandingkan kontestan Pilpres 2024 lainnya seperti pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

“Paslon nomor 1 sangat piawai dalam menggunakan isu Palestina. Mereka menggelar doa ber-

sama dan penggalangan dana untuk Palestina benar-benar sangat canggih untuk menarik perhatian publik kepada mereka. Tentunya masyarakat Indonesia yang simpatik kepada Palestina akan menaruh hati kepada paslon ini,” ucapnya.

Namun dampaknya Anies dan Cak Imin image, personality menjadi sangat terkenal dengan karakter paslon suka memanfaatkan sistem pola politik identitas. Tetapi elektabilitas paslon nomor urut 1 ini akan meningkat di ajang Pilpres 2024 nanti.

“Anies dikenal dengan politik identitas islam modern dan Cak Imin islam kultural jadi mereka sangat kental ke arah Arab-arabnya dibandingkan paslon lain. Tentunya pamor politik identitas sangat kental melekat kepada keduanya,” ucap Togar.

Secara etika menggunakan isu Palestina masuk kerana politik dinilai Bagindo Togar sah-sah saja terlebih lagi memang isu itu harus mendapatkan semua perhatian dari semua orang.

“Kalau untuk etis atau tidak etis bagi saya itu sah-sah saja, justru seandainya Anies dan Cak Imin membawa isu kebangsaan malahan tidak pas. Kalau penilaian saya paslon nomor 1 membahas isu kebangsaan tidak akan menjual dan kurang menarik. Palestina dijadikan isu oleh kedua pasangan ini sangat cerdas cocok untuk keduanya dan jadi lebih menarik di Pilpres untuk didengarkan oleh semua rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Akademisi Sumsel dari Stisipol Candradimuka Palembang b a n g
Ade Indra Chaniago menyebutkan untuk semua

paslon nomor urut 1, nomor urut 2 dan nomor urut 3 mau menggunakan isu Palestina guna menarik dan mencari suara dirasakannya sah-sah saja. Secara pribadi dia juga sangat mendukung karena Palestina bukan hanya sekedar isu agama tetapi sudah menjadi isu kemanusiaan.

“Palestina bukan isu agama tetapi telah jadi isu kemanusiaan dalam konstitusi aturan negara Indonesia juga mengecam secara tegas bentuk penjajahan dan penindasan. Artinya disuarakan di Pilpres dan Pemilu bukan lagi isu seksi, namun sewajarnya Palestina harus disuarakan,” tuturnya.

Dari sisi politik dia menilai Palestina juga masuk dalam kategori isu politik karena menyangkut sengketa wilayah terjadi disana. Dia berharap semua paslon menggunakan Palestina juga sebagai isu politik.

“Palestina itu juga politik jadi sah-sah saja dibawa ke politik. Sebenarnya kalau paslon tidak membawa Palestina menjadi isu mereka itu malah membuat mereka sangat rugi,” pungkasnya.

Sedangkan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palembang, Candra mengatakan, apabila paslon di Pilpres dan caleg di Pemilu menggunakan isu Palestina untuk meraih suara tergantung niat pribadi. Baginya masyarakat Indonesia sangat cerdas melihat fenomena itu, namun isu Palestina di dalam Pemilu masih lumrah dan sah-sah saja.

“Tergantung niat kalau murni untuk suarakan agama dan kemanusiaan itu san-

gat baik. Tetapi kalau hanya untuk meraih suara saja masyarakat pasti tahu,” jelasnya.

Dia bahkan berharap apabila paslon sudah membawakan isu Palestina di Pilpres harus komitmen, artinya saat terpilih benar-benar mendukung Palestina bebas dari jajahan Israel.

“Kalau hanya menggalang dana dan suarakan kepedulian untuk apa. Tentunya kami HMI berharap apabila terpilih Presiden dan Wakil Presiden nanti benar-benar bisa menjadi pemersatu negara islam untuk membebaskan Palestina dari Israel. Itu yang kami harapkan karena persoalan utama itu penjajahan masuk juga ke isu agama kita sesama umat islam harus membantu. Apa lagi Indonesia adalah negara yang penduduknya beragama islam,” ungkapnya.

Caleg DPRD Sumsel Partai PPP Khalisah Hayatuddin menyebutkan Palestina benar-benar isu seksi yang dibawah ke Pemilu. Dia juga menyebutkan sah-sah saja karena Palestina membutuhkan dukungan semua publik di dunia.

“Palestina isu yang sangat seksi dan sangat bagus kalau digabungkan di Pemilu. Apalagi Indonesia banyak sekali beragama Islam di Palestina semua korban-nya umat islam yang dibantai,” jelasnya.

Menurut dosen S2 Fakultas Hukum UMP ini, sebagai caleg dia tidak akan membawa isu Palestina ke Dapil kantung suara dibutuhkannya di Pemilu nanti. Caleg Dapil Sumsel 8 di wilayah Musi Rawas, Lubuklinggau dan Muratara nilainya sangat berat untuk konstituennya.

“Kalau saya tidak akan membawa isu Palestina karena terlalu berat. Terkecuali Pilpres sebab kebutuhan konstituen saya itu bagaimana keinginan yang utama untuk mereka bisa diwujudkan,” jelasnya.

Dia menjabarkan kebutuhan yang sering diinginkan konstituen akses jalan rusak membuat mereka sulit menyalurkan hasil ladang mereka. Lalu kebutuhan ekonomi yang harus dicukupi oleh semua keluarga semakin berat.

“Akses jalan, rumah sakit dan program apa yang bisa mendukung ekonomi mereka. Kalau saya lihat banyak program pemerintah yang ada disini tidak dijalankan. Itu karena para wakil rakyat disini

kemarin tidak berperan penting untuk mereka.

Nah ini yang saya suarakan kalau isu Palestina mereka tidak terlalu paham dan terlalu berat,” pungkasnya.

•RDR



“Kalau demokrasiya keras maka hukum terjadi seperti di masa Orde Baru, bersifat diktator. Sementara kondisi hukum kita saat ini bersifat demokratis sehingga berkarakter populis”

Ardiyan Saptawan



PENILAIAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA BERSIFAT SUBJEKTIF

Penegakkan dan penyelesaian hukum di Indonesia di akhir-akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai mengalami kemunduran. Bahkan ada yang menilai hukum di Indonesia menjadi yang terburuk di masa 10 tahun terakhir ini dengan banyaknya kasus-kasus besar terungkap.

Di sisi lain banyaknya tokoh-tokoh penting dalam penegakan hukum yang menjadi tersangka memberikan citra buruk ke masyarakat dan menjadi konsumsi politik yang paling mudah dan besar pengaruhnya.

Ada banyak persepsi dan berbagai pertimbangan untuk menilai baik buruknya penegakan hukum di Indonesia. Dari semua pertimbangan tersebut, sisi politik yang paling kuat posisinya.

“Sistem demokrasi yang diciptakan membentuk opini yang bermacam-macam pula. Kalau demokrasiya keras maka hukum terjadi seperti di masa Orde Baru, bersifat diktator. Sementara kondisi hukum kita saat ini bersifat demokratis sehingga berkarakter populis,” ungkap pengamat politik dari Universitas Sriwijaya, Ardiyan Saptawan.

Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel menilai penegakan hukum di Indonesia sudah cukup bagus. Program Restorative Justice (RJ) yang diterapkan pemerintah mampu meminimalisir masalah hukum di masyarakat.

Di sisi lain munculnya kasus-kasus hukum besar dengan melibatkan banyak pejabat negara dan penegak hukum sendiri merusak citra baik Indonesia. Di sisi lain banyaknya opini yang berkembang hingga akhirnya malah memperkeruh suasana.

Ia mengatakan, penilaian penegakan hukum di Indonesia dari kalangan masih bersifat subjektif. Jangan melihat atau menilai hanya di kejadian-kejadian sesaat saja tapi harus secara menyeluruh.

Keputusan kontroversial dari Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), ditetapkannya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dan beberapa kasus besar lainnya cukup mencoreng wajah hukum Indonesia.

Disisi lain banyak kasus-

kasus hukum yang terangkat dan mendapat campur tangan langsung dari presiden membuat rakyat merasa terbantu dan merasakan kehadiran negara di kehidupan mereka.

“Kalau saya menilai penegakan hukum di Indonesia sangat baik. Nilainya 7 dan itu artinya sudah bagus. Penilaian itu bukan hanya sesaat saja tapi harus secara keseluruhan,” katanya.

Sudah cukup baik, yang kurang mungkin dalam bidang pengawasan saja. Biasanya setelah ada kejadian aparat penegak hukum (APH) baru dapat perhatian. Tindakan pencegahannya masih sangat kurang. Hal ini yang mungkin harus ditingkatkan lagi.

Penilaian berbeda disampaikan Lius Eka Brahma Saputra selaku kader Partai Golkar Sumsel yang melihat penegakan hukum di Indonesia sudah sangat baik. Berbagai

“Kalau diberi skala 1 sampai 10 maka saya memberikan penilaian di angka 8 lebih karena Pak Jokowi sangat interest dan support terhadap penegakan hukum ini,” terangnya.

Dikatakan Ketua bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar ini, penegakan hukum menjadi salah satu perhatian Presiden Joko Widodo. Hal tersebut bisa dilihat dari tidak adanya campur tangan presiden saat anggota kabinetnya mendapat permasalahan hukum.

“Bila bersalah yah proses saja bukan dilindungi terlepas dia berasal dari partai apa dia,” katanya.

Bila ada yang mengatakan penegakan hukum di Indonesia agak kurang baik rasanya terlalu subjektif.

Sebagai orang yang berlatar belakang dunia hukum, Lius menilai apa yang disampaikan Ganjar Pranowo yang menilai penegakan hukum di Indonesia ada di angka lima agak kontra dengan pernyataan calon wakilnya, Mahfud MD.

Sebagai Menko Polhukam Mahfud MD bahkan menilai penegakan

hukum di Indonesia jauh lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya.

“Artinya apa, mereka berdua saja tidak kompak dalam penilaian. Subjektivitas dari Ganjar Pranowo kalau kita bahas nanti tidak enak lah. Artinya begini kalau kita menilai secara objektif, selama Jokowi memimpin perlindungan hukum sudah cukup baik dan terbukti,” ungkap Ketua Jarnas 98 Aktivis 98 Sumsel ini.

Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya para menteri Jokowi yang tersandung hukum dan semua diproses serta tidak ada yang dilindungi. Kalau memang bersalah yang harus bertanggung jawab.

“Ini artinya Pak Jokowi sangat interest dengan penegakan hukum di Indonesia dan ini jadi program utama dan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan janjinya saat kampanye dulu,” ujarnya.

Sehingga dia menilai apa yang disampaikan Ganjar Pranowo bersifat subjektif

saja karena ada perbedaan pernyataan dari Menko Polhukam.

Sementara Momon Wahyudi yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKB Sumsel enggan menilai secara angka terkait penegakan hukum di Indonesia. Namun dia melihat hukum di Indonesia sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja.

“Kalau untuk skor saya tidak bisa memberikan nilai karena bukan orang hukum. Namun yang saya rasakan, penegakan hukum saat ini terasa tumpang tindih,” ujarnya.

Momon mengungkapkan, saat awal reformasi penegakan hukum sangat baik dan tertata karena tugas pokok dan fungsinya sangat jelas. Seperti proses pemeriksaan, semua kewenangan diberikan ke kepolisian. Saat dipersidangan, diimpahkan ke kejaksaan baru kemudian di sidangkan. Kemudian saat penangkapan dilakukan penuh oleh kepolisian.

Dalam perkembangan selanjutnya dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi yang cukup efektif dalam melakukan penegakan hukum karena bentuk jawaban dari dari krisis kepercayaan di bidang hukum.

“Kalau sekarang kan, polisi bisa menangkap, kejaksaan bisa tangkap, KPK bisa menangkap. Ujung-ujungnya sesama lembaga bisa saling menangkap. Hal ini harus dibenahi karena sama-sama punya power dan saling tangkap,” ungkapnya.

Momon menilai memang ada penurunan di bidang penegakan hukum karena terjadinya tumpang tindih kekuasaan. Meski nilainya tidak bisa disebutkan namun masyarakat juga bisa merasakannya.

Artinya perlu perbaikan di bidang penegakan hukum karena kondisinya saat ini dalam kondisi tidak baik-baik saja. ●RDR





“Terkait permasalahan sengketa kami selaku penyelenggara sifatnya hanya menerima laporan, baik secara langsung maupun tidak langsung”

M Hasbi

MULAI MEMAINKAN PERANNYA Masing-masing

Setelah resmi dimulainya kampanye, seluruh partai politik dan lembaga penyelenggara Pemilu mulai memainkan perannya masing-masing. Partai politik sudah sibuk dengan segala agenda kampanye. Lembaga penyelenggara juga melakukan penguatan personal untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palembang, Muslim mengatakan, saat ini mereka telah melakukan fungsi dan tugasnya sebagai pengawas termasuk meningkatkan SDM baik di tingkat kecamatan hingga kelurahan.

Penguatan itu antara lain melakukan edukasi serta sosialisasi ke pengawas, melakukan tugas di lapangan melalui Panwascam serta melakukan komunikasi ke seluruh stakeholder guna meningkatkan partisipasi masyarakat yang berada di Kota Palembang.

“Seperti membangun komunikasi dengan stakeholder seperti melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan berbagai elemen masyarakat di dalam pengawasan partisipatif harapan kita masyarakat juga ikut peduli terhadap pengawasan partisipatif tersebut, karena untuk menciptakan Pemilu berjalan aman,” tegasnya.

Bawaslu kota Palembang bersama KPU dan partai peserta politik sendiri telah memberikan titik kampanye di beberapa titik. Untuk kampanye Akbar yang melibatkan banyak orang diarahkan ke Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang.

Untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) sendiri telah diatur di dalam surat keputusan KPU nomor 309 tahun 2023 tentang penetapan pemasangan APK. Dimana

dalam keputusan tersebut menetapkan 18 kecamatan serta 94 kelurahan yang tersebar di ratusan ruas jalan di Kota Palembang, Bawaslu bersama KPU sudah bekerjasama untuk menyediakan APK.

Sementara Divisi Hukum dan Sengketa Bawaslu Palembang, M Hasbi mengatakan, memasuki masa kampanye Pemilu, untuk mencegah terjadinya sengketa antara pihak, Bawaslu Palembang akan melihat perkara sengketa. Jika ada permohonan proses sengketa baik antar peserta maupun antara peserta dan penyeleng-

gara pemilu, Bawaslu sudah menyiapkan langkah teknis penyelesaian.

“Pertama kita melihat kelengkapan dokumentasi formulir dan lainnya. Kalau dinyatakan lengkap langsung kita sidangkan. Namun sebelum proses persidangan kami arahkan untuk mediasi perdamaian antara pihak, seandainya mediasi tidak menemukan titik penyelesaian kita lanjutkan proses Ajudikasi setelah itu baru masuk persidangan,” terangnya.

Biasanya lanjut Hasbi, dengan pemahaman demokrasi yang kuat antar Caleg maka sengketa tidak sempat terjadi.

Seperti ketika di suatu tempat Caleg A telah memasang spanduk atau baliho maka kecil kemungkinan Caleg B akan memasang baliho di tempat tersebut.

“Terkait permasalahan sengketa kami selaku penyelenggara sifatnya hanya menerima laporan saja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbeda dengan pelanggaran Pemilu karena berdasarkan temuan di lapangan walaupun tidak ada laporan,” terangnya.

Bawaslu Kota Palembang juga telah melakukan sosialisasi ke peserta Pemilu dengan harapan bisa mengedukasi kepada pemilih sehingga bisa menghindari berbagai perselisihan dengan menghindari isu rasial dan kesukuan yang dapat memecah belah kerukunan anak bangsa.

Bergerak Aktif

Di sisi lain para peserta Pemilu juga telah memainkan tugasnya di pesta demokrasi ini. Selain fokus pada pencalegan para kader juga aktif dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat.

Seperti yang dilakukan ketua relawan Brigade Gibran Rakabuming Raka (Bergerak)

Fajar Febriansyah. Selain fokus pada kemenangan calon presiden dan wakil presiden, dia juga aktif melakukan sosialisasi pencalonannya sebagai anggota legislatif.

Dikatakan Fajar, Bergerak merupakan relawan yang mereka inisiasi sendiri serta sifatnya mandiri. Tugas mereka sebagai relawan yakni mewujudkan visi-misi mereka sebagai Caleg sekaligus mengenalkan sosok Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024.

“Relawan Bergerak

sendiri ada diseluruh Indonesia, dan untuk wilayah Sumsel saya ditunjuk Dewan Pimpinan Pusat sebagai ketua, dan kami sudah mengkonsolidasikan kekuatan kami baik di Palembang hingga di 17 kabupaten dan kota di Sumsel,” terang Fajar.

Fajar mengatakan, bahwa relawan Bergerak sendiri untuk mendukung Gibran dalam menggaet pemilih milenial serta generasi muda. Pergerakan relawan menyampaikan melalui info edukasi politik terkait kepemimpinan kaum muda, dan mengenalkan sosok Gibran kepada masyarakat luas terutama ke pemilih muda.

Tugas mereka adalah menjaring suara kaum milenial dan Gen Z dengan melakukan konsolidasi bersama tokoh-tokoh muda, melakukan diskusi untuk menyamakan pandangan dengan influencer muda yang selama ini kurang interest dengan politik.

Fajar menilai kaum muda terkesan kurang melek politik sehingga harapan mereka dengan gerakan yang dilakukan dapat merangkul kekuatan anak muda untuk memilih Gibran Rakabuming sebagai calon pemimpin masa depan.

“Untuk itulah relawan Bergerak selalu berusaha meyakinkan kepada teman-teman generasi muda bahwa kita hari ini bersama Gibran, kita titipkan harapan dan cita-cita anak muda. Sosok Gibran yang masih muda sehingga jangka panjang bersama beliau untuk mewujudkan pemimpin sesuai harapan dan cita-cita bangsa,” jelasnya.

Fajar meyakini sosok Gibran adalah salah satu pemimpin masa depan untuk Indonesia sekaligus mewakili kaum muda saat ini. Meski banyak nada pesimis namun bagi relawan ini merupakan suatu tantangan untuk mengenalkan Gibran lebih masif lagi.

Di sisi lain, sebagai kader PAN mereka juga memiliki keuntungan tersendiri dengan sosok Prabowo - Gibran. Keduanya sosok yang pas untuk memimpin Indonesia dan imbasnya banyak dirasakan para kader terutama dari para Caleg PAN sendiri. •RDR





PENINDAKAN HUKUM MEROSOT DI AKHIR JABATAN

Potret hukum di Indonesia semakin berjalan semakin bobrok dinilai oleh mahasiswa dan disadari oleh para kader partai politik. Kondisi itu dampak dari tertangkap Irjen Ferdy Sambo petinggi Polri kasus pembunuhan, Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dan dipecat Ketua KPK. Kemudian pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) atas pelanggaran berat kode etik.

Tokoh-tokoh penting di bidang penegakan hukum memberikan gambaran jelas betapa buruknya penindakan di akhir masa jabatan Joko Widodo sebagai Presiden RI. Belum lagi banyak tokoh lain yang terjadi ikut terlibat di berbagai kejahatan seperti peredaran narkoba, illegal logging, pertambangan ilegal serta lainnya.

Hal ini menimbulkan keprihatinan masyarakat Indonesia. Apalagi dengan adanya tumpang tindih kekuasaan dalam hukum hingga mereka akhirnya saling tangkap menangkap karena ketahuan melakukan kejahatan.

Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Sriwijaya (Unsri) Mohd Azra D Dzaky menyebutkan hukum di Indonesia bobrok. Padahal seharusnya para petinggi hukum di Polri, KPK dan Mahkamah Konstitusi serta Kejaksaan menjadi pelindung hukum bukan malah mencoreng nama Indonesia.

“Seluruh penegak hukum di Indonesia

bobrok, kalau kita mahasiswa memberikan nilai 3! Bagaimana rakyat bisa percaya dengan supremasi hukum dalam penegakan hukum apalagi para petingginya seperti itu,” kata dia.

Menurutnya di pemerintahan Presiden Joko Widodo awalnya baik-baik saja, tidak tahu di akhir jabatan semakin buruk terlebih lagi kekecewaan terhadap aksi MK dinilai melanggar kode etik dan konstitusi membuat aturannya sendiri.

“Sebenarnya masyarakat Indonesia 80 persen puas dengan kinerja Jokowi salah satunya merasa jalan tol. Kendati juga ada pembangunan tidak tepat sasaran seperti pembangun bandara tidak tepat sasaran. Namun akhir-akhir khusus di bidang hukum semuanya menjadi kacau balau benar-benar bobrok pemerintah ini,” ucapnya.

Bahkan Jokowi mendapat predikat dari mahasiswa Dewa Penipu karena semua aspek hukum seakan-akan dikuasai olehnya. Bahkan ada menteri dari partai Nasdem disingkirkan karena tidak masuk dalam Tim politik Jokowi.

“Wajah seperti ingin menguasai hukum dan politik ini yang membuat kita menyebutnya Dewa Penipu,” tuturnya tegas.

Diakuinya mahasiswa melakukan evaluasi kinerja Jokowi selama menjadi Presiden dua periode banyak juga semua sektor yang raport merah. Namun dari segi hukum di Indonesia baru di era Jokowi para penegak hukum kompak terjatuh hukum benar-benar merusak supremasi hukum di Tanah Air.

“Semoga saya pemimpin bangsa Indonesia kedepannya bisa memperbaiki supremasi hukum di Indonesia yang sudah bobrok ini,” harapnya.

Dari semua paslon yang berlaga di Pilpres 2024, mahasiswa tidak bisa memberikan rekomendasi agar tidak merusak demokrasi. Pihak ingin masyarakat Indo-

nesia menentukan sendiri nasib bangsa Indonesia kedepannya.

“Biarkan masyarakat saja nanti menentukan karena ini sistem demokrasi. Kami yakin masyarakat Indonesia sudah cerdas apalagi pemilihan ini didominasi kaum muda yang melek teknologi mereka bisa melihat rekam jejak semua calon pemimpinnya ini,” pungkasnya.

Sementara Ketua Badan Pemenangan Pemilu Sumsel 2 DPD Partai Golkar Sumsel Hilmin mengakui hukum di Indonesia memang bobrok itu disebabkan karena faktor moral para petinggi hukum yang harus diperbaiki.

“Penegak hukum itu modal utamanya mereka adalah moral karena untuk pintar semua petinggi Polri, KPK dan MK pasti pintar-pintar, namun moralnya bagaimana? Baru berikutnya petinggi itu harus dilihat dari integritas. Jadi dua faktor moral dan integrasi bulan hanya sekedar pintar dan paham hukum saja,” kata dia.

Kemungkinan lain dia juga mencermati bagaimana sistem rekrutmen para pejabat atau petinggi hukum di Tanah Air itu sebelumnya. Karena faktor rekrutmen diawal pastinya salah hingga berdampak buruk kinerjanya di masa depan.

“Bisa saja saat masuk menjadi anggota Polri, KPK dan MK karena ada koneksi orang tertentu. Bisa juga di rekrut awal menggunakan metode uang dan sebagainya. Nah faktor rekrutmen juga menentukan kelayakan untuk menjadi penegak hukum di Indonesia jangan asal-asalan,” ungkapnya.

Dia menilai untuk paslon capres dan cawapres Prabowo Subianto - Gi-

bran Rakabuming Raka nomor urut 2 telah memetakan bagaimana cara memperbaiki hukum di Indonesia.

Dia menilai Prabowo Subianto yang akan konsentrasi di bidang hukum secara langsung karena dinilai memang bisa memecahkan solusi untuk potret buruk hukum di Indonesia kedepannya.

“Kita akan pikirkan kesejahteraan para penegak hukum di Indonesia, agar tidak ada celah untuk mereka melakukan pelanggaran lagi. Kalau mereka berani selain sudah kehilangan pekerjaan juga kehilangan jabatan jadi langsung kita pecat. Sedikit kesalahan ditemukan sebelum menjadi besar eksekusinya di pecat karena mereka sudah mendapatkan kesejahteraan yang cukup,” jelasnya.

Paslon nomor urut 2 tidak hanya menilai supremasi hukum di Indonesia harus ditegakkan untuk kepentingan masyarakat saja, kepastian hukum juga bisa masuk ke dalam semua sektor. Dia menyebutkan misalnya izin untuk proyek, perjanjian dan izin tambang.

“Hukum tidak hanya pidananya saja semua kepentingan masyarakat izin dan kebutuhan regulasi juga harus ditunjang dengan adanya pejabat penegak hukum yang baik. Tetapi saya tidak mau menilai kondisi hukum di Indonesia melalui nilai berapa angkanya memberikan nilai harus disertai dengan data yang valid,” terang dia.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel Tunteja juga mengakui bahkan para penegak hukum di Indonesia nilainya kinerjanya jelek. Terlebih lagi terbaru dinilai Ketua KPK dan Ketua MK benar-benar membuat rakyat Indonesia geleng-geleng kepala.

“Para penegak hukum saat ini semakin kacau terutama kami PD Perjuangan menilai Ketua MK dengan keputusannya yang tidak jelas seperti itu. Kondisi hukum di Indonesia saat ini menyedihkan,” terangnya.

Dia menilai kasus beragam kasus pelanggaran HAM yang tidak selesai. Lalu beragam keputusan diberikan tiba-tiba seperti cukai tanpa ada riset efeknya merugikan Indonesia.

“Itu tadi hanya segelintir saja banyak sebenarnya kasus hukum di Indonesia ini tidak berjalan dengan baik,” jelasnya.

Menurutnya Jokowi sebenarnya memulai dengan sangat baik namun akhir-akhir jabatannya menjadi buruk. Kalau dinilai secara angka dia memberikan nilai 6.

Dia berharap pemimpin Indonesia kedepan bisa memberikan jawaban besar atas bobroknya supremasi hukum di Tanah Air.

Dia optimis Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD akan bisa menjawab semua persoalan itu apabila rakyat memberikan kesempatannya.

“Ganjar dan Mahfud MD akan memberikan solusi kepada semua persoalan hukum di Indonesia.

Kita lihat saja Mahfud MD dia selalu tegak lurus terhadap hukum di Indonesia,” ucap Tun Teja. ●RDR





“DPP PPP akan memberikan sanksi tegas kepada kader yang mbalelo dari keputusan partai untuk menegakkan disiplin organisasi. Kalau masih memegang kartu tanda anggota (KTA), maka akan dicabut”

Achmad Baidlowi

KADER PPP JANGAN MBALELO

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung penuh langkah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, untuk merebut kekuasaan di 2024.

Salah satu dukungan yang bisa dilakukan yakni dengan menyosialisasikan visi misi dan program kerja Ganjar-Mahfud.

Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, memita kepada seluruh kader partai berlambang Ka'bah untuk menyosialisasikan visi misi Ganjar-Mahfud di tengah-tengah masyarakat.

“Saya meminta kader membaca secara utuh visi misi capres-cawapres kita untuk nantinya diurai oleh para caleg dan disosialisasikan kepada rakyat,” kata Mardiono, Senin, 4 Desember 2023.

Mardiono meminta kepada seluruh kadernya untuk tetap fokus dalam menghadapi Pilpres 2024. Tidak lupa juga untuk langsung terjun ke masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengajak masyarakat berjuang bersama PPP untuk memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud.

“Kader jangan sampai gagal fokus. Saat ini fokus mengajak rakyat untuk berjuang kembali bersama PPP dan menyampaikan program kerja ke masyarakat,” kata Mardiono.

Salah satu program pasangan Ganjar-Mahfud yang penting untuk disosialisasikan adalah kenaikan gaji guru ngaji. Menurutnya, program tersebut satu nadi dengan harapan dari PPP.

Mardiono menyampaikan, guru ngaji merupakan penjaga moralitas bangsa. Maka dari itu, PPP sebagai partai yang menganut nilai-nilai Islam harus mendukung penuh program pasangan Ganjar-Mahfud dalam mensejahterakan guru ngaji di seluruh In-

donesia.

“Seperti program guru ngaji yang menjadi perhatian, di mana mereka adalah penjaga moralitas bangsa. Kemudian, terkait marbot masjid. Hal ini sejalan dengan program yang diusung juga oleh PPP,” kata Mardiono.

Tidak hanya itu, dalam memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud, para petinggi PPP mengharapkan para kadernya tidak terpengaruh dengan dinamika politik yang terjadi saat ini.

Salah satunya, capres nomor urut 02, Prabowo Subianto yang ingin merebut ceruk pemilih PPP di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ketua DPP PPP, Achmad Baidlowi atau Awiek, meminta agar para kadernya tidak khawatir dengan kampanye yang dilakukan Prabowo Subianto.

Awiek menjelaskan, di mana kampanye hari pertama Prabowo Subianto berkunjung ke Pondok Pesantren Miftahul Huda, Tasikmalaya. Dia menerangkan, kedatangan Prabowo Subianto ke Ponpes Miftahul hanya sekadar silaturahmi. Jadi, Awiek meminta para kader untuk tidak menanggapi dengan serius.

“Hasil klarifikasi ke Uu Ruhzanul Ulum terkait kehadiran Prabowo Subianto ke Ponpes Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya yang selama ini merupakan basis PPP, dalam konteks silaturahmi pejabat negara yang harus dihormati,” kata Awiek.

Dikatakan Awiek, sebelum-

ya Ganjar Pranowo juga berkunjung ke Ponpes Manonjaya. Kehadiran Ganjar diterima langsung oleh KH Asep Maosul Affandi selaku anggota DPR RI dari PPP.

Disampaikan Awiek, mereka berkomitmen untuk memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

“Baik Asep maupun Uu berkomitmen menjalankan perintah DPP PPP memenangkan Ganjar-Mahfud,” kata Awiek.

Dia mengatakan, jika terdapat kader PPP yang mendeklarasikan dukung terhadap pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu tidak berkaitan dengan internal partai.

“Terkait adanya berita yang mengatasnamakan kader PPP mendeklarasikan dukungan ke Prabowo-Gibran dan meresmikan posko, DPP PPP

tidak tahu menahu. Mereka bukan lagi pengurus PPP, sehingga tidak ada hubungan dengan DPP PPP,” ujar Awiek.

Selain itu, Awiek menegaskan, PPP akan memberi sanksi tegas kepada kader yang tidak mematuhi keputusan partai dalam mendukung pasangan Ganjar-Mahfud di konstelasi Pilpres 2024. PPP juga tidak akan segan-segan untuk memecat kader yang mbalelo.

“DPP PPP akan memberikan sanksi tegas kepada kader yang mbalelo dari keputusan partai untuk menegakkan disiplin organisasi. Kalau masih memegang kartu tanda anggota (KTA), maka akan dicabut,” kata Awiek.

Oleh karenanya, Awiek meminta kepada seluruh kader PPP tetap untuk mematuhi keputusan partai berlambang Ka'bah dalam mendukung pencapresan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Di sisi lain, Awiek juga mengajak kepada seluruh kader PPP untuk meraih suara sebanyak-banyak di Pemilu maupun di Pilpres 2024. PPP juga akan menggarap semua segmen demi memaksimalkan suaranya di Pemilu.

Segmen yang tidak luput dari perhatian PPP adalah buruh. Menurutnya, dukungan para buruh ini sangat penting. Sebab, jumlahnya begitu banyak. Sehingga, sangat berpotensi untuk menaikkan suara mereka.

“Semua segmen kita garap, khusus segmen buruh itu kan memang segmented yang komunitas itu cukup memiliki dampak elektoral yang penting,” kata Awiek.

Pentingnya suara buruh ini sudah terbukti. Pasalnya, seluruh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden berupaya merebut simpati kalangan buruh untuk bisa memberikan dukungannya. Dia menilai, suara buruh pada Pilpres 2024 akan menjadi rebutan.

Ditambahkan Awiek, tidak jarang suara para buruh menjadi penentu kemenangan bagi pasangan calon. Oleh karenanya, para kader PPP diminta untuk mengambil simpati masyarakat dan kalangan buruh.

“Karena kita banyak juga penentu, artinya penentu kemenangan itu banyak tidak menutup kemungkinan dari kalangan buruh,” tandas Awiek. ●RDO





SBY SIAP TURUN GUNUNG MENANGKAN PRABOWO-GIBRAN

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), turun gunung mengampanyakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

SBY menginstruksikan jajaran Partai Demokrat untuk turut memenangkan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Seruan ini disampaikan SBY saat berpidato di hadapan ratusan calon anggota legislatif Partai Demokrat tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam acara pengarahan dan pembekalan di Kota Cirebon, Jawa Barat, Kamis, 30 November 2023.

“Sanggup memenangkan Pak Prabowo?” tanya SBY kepada kadernya.

“Siap!” seru ratusan caleg yang hadir.

SBY menyebut, Demokrat memiliki dua tujuan pada Pemilu 2024. Pertama, memenangkan pasangan capres dan cawapres Prabowo-Gibran. Kedua, mengembalikan kejayaan Demokrat pada pemilihan legislatif, seperti periode 2004 dan 2009.

Oleh karenanya, para caleg Demokrat diminta untuk lebih rajin bertemu masyarakat, baik melalui media sosial maupun terjun langsung ke konstituen. SBY bahkan memerintahkan para caleg berjumpa dengan warga setiap hari.

Terkait pilpres, SBY menilai, tiga pasangan capres-cawapres yang bakal berlaga merupakan tokoh bangsa. Menurutnya, tiga pasang kandidat punya tujuan mulia memajukan Indonesia.

Namun, Demokrat telah menjatuhkan dukungan untuk Prabowo-Gibran. Oleh karenanya, partai bintang mercy itu bakal turut memperjuangkan kemenangan keduanya.

“Pak Prabowo saya nilai, kita nilai, lebih cakap, lebih mampu, dan lebih siap menjadi Presiden Republik Indonesia lima tahun ke depan,” ujarnya.

Kendati mendukung Prabowo yang notabene bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, SBY menyebut, bukan berarti Demokrat mendukung seluruh kebijakan pemerintah saat ini.

Presiden keenam RI itu mengatakan, Demokrat akan melanjutkan program Jokowi yang baik. Misalnya, rencana pengangkatan 1 juta guru atau tenaga honorer. Namun, bersamaan dengan itu, Demokrat juga menyoroti sejumlah hal

yang masih jadi persoalan, seperti banyaknya utang pemerintah.

“Utang kita sudah terlalu tinggi. Sebaiknya nanti diturunkan. Pemerintah, pemimpin, harus bisa mengendalikan jumlah utang kita agar tidak terlalu banyak. Tidak membebani anak cucu dan tidak membebani pemerintah mendatang,” ucap SBY.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menambahkan, pihaknya percaya diri Prabowo-Gibran bisa memenangkan Pilpres 2024 hanya dengan satu putaran.

AHY yakin karena SBY siap turun gunung untuk memenangkan pasangan itu. Selain itu, AHY juga optimistis usai melihat hasil lembaga survei, di mana Prabowo-Gibran lebih unggul secara signifikan daripada pasangan lain.

“Elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran alhamdulillah berada di rentang 42-45 persen. Artinya bukan hanya unggul, tapi juga kuat. Cukup signifikan dibandingkan dengan elektabilitas paslon lainnya,” ujar AHY.

“Angka ini berdasarkan hasil 3 lembaga survei hasilnya serupa, 42-45 persen. Tentu angka ini semakin menguatkan semangat bahwa kita bisa menang 1 putaran,” sambungnya.

AHY menjelaskan, untuk memenangkan Prabowo-Gibran satu putaran, tetap ada syaratnya. Dia mengatakan semua pihak harus bekerja keras dan kerja cerdas. Mereka juga harus menyiapkan strategi yang khas.

“Pendekatannya harus pas. Dalam konteks ini, Partai Demokrat tentu siap dan telah melakukan upaya untuk

tuk terus membangun sinergi dan kolaborasi dengan partai-partai lainnya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, baik melalui TKN dan TKD maupun secara langsung berinteraksi dan berkoordinasi dengan jaring-jaring relawan di lapangan,” tuturnya.

Kemudian, AHY menyatakan dirinya siap mendampingi Prabowo untuk berkampanye di berbagai daerah. Jika dipanggil Prabowo, AHY mengaku akan selalu siap.

AHY kembali mengungkit SBY yang siap turun gunung untuk memenangkan Prabowo. Apalagi, SBY tahu betul ciri-ciri pemimpin yang layak memimpin Indonesia.

“Sedangkan Bapak SBY, sahabat Bapak di sini, dalam beberapa kesempatan telah mengatakan beliau juga siap untuk turun gunung untuk bisa sama-sama berjuang memenangkan Bapak Prabowo Subianto,” katanya.

“Lebih jelasnya nanti beliau sendiri yang akan sampaikan ke kita semuanya, bukan hanya berikan testimoni sebagai seorang sahabat, tetapi sebagai seorang Presiden yang pernah memimpin selama 10 tahun. Tentunya beliau banyak mengetahui karakter kapasitas seperti apa yang memang dibutuhkan untuk memimpin negeri sebesar Indonesia,” imbuh AHY.

Diberi tugas khusus memenangkan Prabowo di Jatim, AHY turut membeberkan bahwa Prabowo meminta Demokrat untuk memenangkan

Prabowo-Gibran. Dia mengaku merasa terhormat diberikan tugas khusus tersebut.

“Oleh karena itu, kami merasa terhormat ketika Bapak Prabowo memberikan tugas khusus kepada Partai Demokrat untuk bisa bantu menangkan suara di Jatim. Insyaallah, Pak Prabowo, kami akan bekerja sungguh-sungguh menjalankan amanah tersebut,” jelas dia.

Meski demikian, AHY menekankan Demokrat juga akan berjuang di wilayah lain, bukan hanya di Jatim. AHY mengatakan, Demokrat akan aktif di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, hingga Papua.

“Di antaranya tentu dengan sosialisasi visi misi dan program unggulan pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran,” imbuh AHY.

AHY juga mengungkapkan SBY terus memantau sekaligus memberikan dorongan moril kepada seluruh caleg Partai Demokrat. “Tentunya berharap bahwa kali ini Partai Demokrat juga punya peluang yang lebih baik dari pemilu sebelumnya,” kata AHY di Kawasan Jakarta Timur, Selasa, 28 November 2023.

Menurut AHY, ayahnya juga berpesan agar para caleg harus bekerja keras selama pemilu. Sebab, persaingan di pemilu legislatif sangat kompetitif.

“Parta-partai lain, caleg-caleg lain, juga terus berusaha. Tapi Demokrat juga insya Allah punya hak dan punya semangat untuk bisa menduduki kursi-kursi di parlemen nanti,” ucapnya.

AHY menegaskan, SBY yang pernah menjabat sebagai Presiden ke-6 RI ingin para caleg dan kadernya bekerja keras dan total selama pemilu ini. SBY juga berpesan agar para caleg dan kader Partai Demokrat turut menjaga agar pemilu berjalan damai dan demokratis.

“Beliau hanya menginginkan kita bekerja total, all out yang baik, dengan cara-cara yang baik, beretika termasuk menjaga agar pemilu ini berjalan dengan damai, dengan demokratis. Kita berharap ini bukan hanya menjadi ajang lima tahunan tetapi juga menjadi ajang pemilu berkualitas,” tutur AHY.

●RDO





“Kami menginstruksikan semua anggota Fraksi PKB DPR RI untuk turun ke bawah. Menyapa langsung konstituen mereka secara face to face di daerah pemilihan masing-masing “

Cucun Ahmad Sjamsurijal

KAMPANYE DOOR TO DOOR PKB INCAR 100 KURSI DPR

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus memantapkan strategi memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau AMIN. PKB juga berharap meraih target 100 kursi DPR RI dalam Pemilu 2024.

Salah satu strategi yang akan dilakukan PKB untuk mencapai target tersebut adalah dengan menggenjot intensitas penyapaan pemilih dari pintu ke pintu atau door to door.

“Kami menginstruksikan semua anggota Fraksi PKB DPR RI untuk turun ke bawah. Menyapa langsung konstituen mereka secara face to face di daerah pemilihan masing-masing. Penyapaan secara langsung ini penting sebagai ajang sosialisasi sekaligus serap aspirasi,” ujar Ketua Fraksi PKB DPR, Cucun Ahmad Sjamsurijal, dalam kegiatan Konsolidasi Fraksi PKB DPR RI di Mercure Convention Center Ancol Jakarta, Kamis, 30 November 2023.

Cucun menyebut, karakteristik pemilih kali ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Dalam Pemilu 2024, daftar pemilih didominasi kaum muda, baik dari kalangan milenial maupun gen Z. Mereka merupakan pihak yang kritis, sehingga harus diberikan pemahaman secara langsung.

“Mereka ini mempunyai karakter unik yang kritis, mudah mengakses informasi, dan cenderung mengerti hak dan kewajiban mereka. Dengan karakter seperti ini, calon anggota legislatif tidak bisa sekadar janji tanpa menjelaskan langkah dan komitmen mereka,” kata Cucun.

Dia mengungkapkan, berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU, jumlah pemilih muda mencapai 56,45 persen dari total pemilih. Jumlah ini terdiri dari kalangan milenial sebanyak 66.822.389 pemilih atau 33,60 persen dari total pemilih. Lalu, dari kalangan gen Z

sebanyak 46.800.161 pemilih atau 22,85 persen.

“Dari data ini maka perlu pendekatan khusus yang intensif bagi pemilih muda. Dan Fraksi PKB menginstruksikan anggota turun langsung ke lapangan kalau tidak ingin lewat dalam Pemilu 2024,” ucap Cucun.

Cucun menyebut, keberadaan pasangan AMIN bisa menjadi nilai lebih bagi kader PKB untuk mendekati pemilih muda. Menurut Cucun, pasangan Anies-Muhaimin mempunyai program khusus untuk kaum muda, seperti penyediaan lapangan kerja hingga 15 juta dalam waktu lima tahun, menyediakan 2 juta hunian di dekat pusat kota dengan harga terjangkau, maupun pemberian 100.000 beasiswa pendidikan untuk jenjang S2 dan S3 setiap tahun.

“Keberadaan Ketua Umum PKB Gus Imin sebagai cawapres juga harus menjadi nilai jual tersendiri karena kita bisa menyampaikan tawaran program kerja konkret terkait persoalan mendasak bagi kaum muda, baik di bidang ketenagakerjaan maupun bidang pendidikan,” kata

Cucun.

Anggota Dewan Pertimbangan Timnas AMIN ini menegaskan, target kemenangan pasangan AMIN dan raih 100 kursi DPR RI di Pemilu 2024 merupakan harga mati. Menurutnya, 58 anggota fraksi PKB DPR merupakan tulang punggung utama.

“Jadi kami terus melakukan konsolidasi, mematangkan strategi untuk meraih simpati, dan dukungan pemilih sebanyak-banyaknya,” ucap Cucun.

Di sisi lain, capres dan cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memastikan tetap membawa isu perubahan saat berkampanye. Anies memulai kampanye Pilpres

2024 di Jakarta, sedangkan Cak Imin ke Surabaya. Anies mengaungkan perubahan dari pelbagai sisi antara lain keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

“Sudah lama dari dulu kita kampanye, satu pesan utama, melahirkan keadilan. Visinya Indonesia adil makmur untuk semua,” kata Anies.

Cak Imin menam-

bahkan, salah satunya perubahan adalah terkait pemenuhan kebutuhan pokok. Cak Imin ingin rakyat Indonesia bisa menikmati makan-makanan sehat dan bergizi sepanjang hari.

“Perubahan, perubahan nasib rakyat, perubahan dari yang di akhir bulan makan mi instan menjadi setiap bulan penuh makan sehat,” ujar dia.

Tak dipungkiri, banyak masyarakat yang menghemat uang makan saat akhir bulan. Sehingga, mereka memilih mi instan untuk menghilangkan rasa lapar.

“Begini, kalau satu bulan gaji biasanya di akhir bulan rata-rata makannya mi instan, perubahan artinya tidak lagi makan mi instan, satu bulan penuh makanan bergizi,” ujar dia.

Cak Imin tak mau lagi masyarakat Indonesia terlalu sering makan mi instan. Dia menginginkan ngait-ngaitkan dengan sosok kepemimpinan. “Kalau semua masyarakat rakyat kita makan mi instan, akan lahir pemimpin-pemimpin instan,” ujar Cak Imin.

Siap Jadi Oposisi

Ketua Umum PKB sekaligus cawapres nomor urut 01, Muhaimin Iskandar, mengaku siap jika harus menjadi oposisi pada pemerintahan mendatang. Cawapres pendamping Anies Baswedan itu bilang, PKB tak masalah jika berada di luar pemerintahan. Justru, kata Imin, partainya ingin merasakan posisi itu setelah hampir 20 tahun menjadi partai politik koalisi pemerintah.

“Saya tentu saja amat sangat siap menjadi oposisi karena belum pernah merasakan oposisi, ingin tahu rasanya,” kata Muhaimin saat menyampaikan visi-misi di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Senin, 4 Desember 2023.

Menurut Cak Imin, oposisi punya tugas mulia untuk mengontrol jalannya pemerintahan. “Oposisi itu pekerjaan mulia, oposisi itu orang mulia yang harus ada untuk mengontrol, meluruskan jalan supaya tidak salah,” ujarnya.

Cak Imin pun menyebut, PKB kerap diabaikan sebagai oposisi setelah bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Padahal, sampai saat ini, tiga kader PKB masih aktif menjabat sebagai menteri Kabinet Indonesia Maju.

“Jadi itulah faktanya, yang perlu kita pahami, bahwa pada dasarnya, oposisi itu pekerjaan penting,” tutur Wakil Ketua DPR RI itu. •RDO



“Indikasi Prabowo-Gibran menang satu putaran adalah survei di lapangan. Di tempat yang katanya angker, ternyata Prabowo tipis saja kalahnya, hanya kurang satu persen”

Budiman Sudjatmiko



YAKINLAH PILPRES 2024 SATU PUTARAN

Pemilihan Presiden 2024 sudah dipastikan diikuti tiga pasangan capres-cawapres. Jumlah paslon yang lebih dari dua membuat pesta demokrasi tahun depan berpotensi berlanjut ke putaran kedua. Meski, masih ada pendukung yang meyakini Pilpres bisa berakhir dalam satu putaran.

Berdasarkan hasil survei Y-Publica, 15-22 November 2023, pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang punya potensi memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran.

Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo-Gibran tercatat mencapai 50,2 persen. Sementara itu, dua pasangan lainnya tertinggal dengan selisih elektabilitas relatif cukup jauh. Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih 23,4 persen, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 17,9 persen, dan sisanya tidak tahu/tidak jawab 8,5 persen.

“Pasangan Prabowo-Gibran bakal memenangi Pilpres 2024 yang kemungkinan akan berlangsung hanya dalam satu putaran,” kata Direktur Eksekutif Y-Publica, Rudi Hartono, Jumat, 1 Desember 2023.

Menurut Rudi, terjadi lonjakan signifikan elektabilitas Prabowo ketika dipasangkan dengan putra sulung Presiden Joko Widodo yang masih menjabat Wali Kota Surakarta. Pada survei Agustus dengan simulasi banyak nama, elektabilitas Prabowo masih berkisar 30 persen.

Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan kepala daerah berusia kurang dari 40 tahun untuk maju pada Pilpres 2024, Gibran dapat melaju dalam kontestasi pilpres dan mendongkrak elektabilitas pasangan calon nomor urut 2 tersebut.

“Masuknya Gibran ke dalam gelanggang pilpres makin memberikan dorongan kuat bagi Prabowo, sebagai bentuk dukungan kuat Jokowi kepada mantan rival dua kali pilpres yang kini menjadi sekutu kuat dalam pemerintahan,” tegas Rudi.

Sebelumnya, cawe-cawe Jokowi dengan memberikan endorsement masih tampak samar-samar, khususnya kepada Prabowo. “Majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo mengerek elektabilitas hingga kemungkinan menang satu putaran,” kata Rudi.

Hingga paruh pertama 2023, Jokowi masih membagi dukungan kepada Prabowo dan Ganjar. “Format idealnya saat itu adalah memasangkan dua figur yang bisa memberikan jaminan atas keberlanjutan program usai Jokowi tidak lagi menjabat presiden,” jelas

Rudi.

Namun, perpecahan tak terhindarkan setelah Ganjar bergabung bersama elite PDIP lainnya menolak kehadiran Timnas Israel pada rencana Piala Dunia U-20.

“Ganjar lebih memosisikan diri sebagai petugas partai alih-alih tokoh yang bisa bersikap lebih independen,” terang Rudi.

Pertentangan Jokowi dengan elite PDIP, menurut dia, makin menajam seiring dengan menguatnya dukungan Jokowi kepada Prabowo. Puncaknya saat keluar putusan MK, serangan demi serangan dari kubu PDIP dialamatkan kepada Jokowi dan keluarganya hingga dituduh berkhianat dan membangun dinasti.

“Dengan situasi yang berkembang saat ini, PDI Perjuangan berusaha mengalkulasi kerusakan yang potensial dialami dengan menekan seminimal mungkin. Target utama saat ini adalah menjaga agar suara PDI Perjuangan tetap solid atau tidak terlalu tergerus oleh konstelasi pilpres,” kata Rudi.

Jika dilihat dari kekuatan dukungan publik terhadap Ganjar, nyaris tidak ada penambahan elektabilitas ketika berpasangan dengan Mahfud. Tambahan elektabilitas Anies malah lebih tinggi, hampir 5 persen setelah berpasangan dengan Cak Imin.

“Ancaman bagi kubu Ganjar dan PDI Perjuangan makin besar jika Anies-Cak Imin mampu mencuri peluang untuk memperbesar elektabilitas dalam 2,5 bulan ke depan hingga bisa mengejar, dan bahkan naik ke peringkat kedua menggeser Ganjar-Mahfud,” terangnya.

Hal senada juga dite-

mukan dalam survei Polmatrix Indonesia yang dilakukan 1-7 November 2023. Hasil survei itu menunjukkan Prabowo-Gibran berpotensi menang satu putaran dengan elektabilitas mencapai 48,4 persen.

Dengan raihan elektabilitas mendekati 50 persen, Prabowo-Gibran unggul jauh dua pasangan lainnya. Ganjar-Mahfud menduduki peringkat kedua dengan elektabilitas 26,6 persen, sedangkan Anies-Muhaimin 17,3 persen, dan sisanya tidak tahu/tidak jawab 7,7 persen.

“Keunggulan Prabowo Subianto semakin melejit setelah berpasangan dengan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka,” kata Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia, Dendik Rulianto, di Jakarta, Rabu, 15 November 2023.

Pada survei Juli, elektabilitas Prabowo dalam simulasi banyak nama mengalami tren kenaikan menuju level 30 persen. Putusan MK yang memperbolehkan pemimpin negara berusia di bawah 40 tahun, tetapi telah menjabat kepala daerah untuk dicalonkan pada Pilpres, melempangkan jalan bagi Wali Kota Solo itu untuk maju dalam arena kontestasi.

Menurut Dendik, masuknya Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo menjadi simbolisasi paling nyata dari dukungan Jokowi.

Dewan Pembina Relawan Prabowo Budiman Bersatu (Prabu), Budiman Sudjatmiko, meyakini Prabowo-Gibran dapat menang satu putaran dalam Pilpres 2024 karena survei lapangan di tempat angker hanya kalah tipis.

“Indikasi Prabowo-Gibran menang satu putaran adalah survei di lapangan. Di tempat yang katanya angker, ternyata Prabowo tipis saja kalahnya, hanya kurang satu persen,”

kata Budiman di Bandar Lampung, Senin, 4 Desember 2023.

Menurutnya, dengan survei-survei di tempat angker yang kalahnya kurang dari satu persen tersebut, sekarang tinggal bagaimana seluruh pihak yang mendukung Prabowo-Gibran untuk bekerja keras dalam dua bulan ke depan.

“Tapi tentu saja realistiknya untuk Lampung 60 persen minimal. Saya yakin nasional bisa capai ke arah sana kurang lebih,” kata dia.

Menurut Budiman, semua orang akan menyadari ketika debat capres dan cawapres, di mana Prabowo-Gibran bisa menunjukkan kualitasnya dengan berbicara dengan banyak orang.

“Enggak ada pilihan lain percaya. Saya ini bukan dukun, tapi mudah-mudahan analisis untuk hal-hal strategis banyak tepatnya,” kata dia.

Budiman pun menegaskan, Prabowo-Gibran sangat siap dalam debat capres dan cawapres, baik memakai bahasa Indonesia, Jawa, maupun Inggris.

“Kami siap mau debat pakai Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa, dan Inggris kalau perlu. Kami siap debat apapun, bahkan sudah siapkan tim pakar dari Tim Kampanye Nasional (TKN),” kata dia.

Sementara itu, Wakil Komandan Penggalangan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Sangap Surbakti, optimistis pasangan tersebut dapat menang satu putaran pada Pilpres 2024.

Dia menyatakan rasa optimistis tersebut muncul setelah menganalisa tren positif dari sejumlah lembaga survei yang kerap merilis pasangan nomor urut 02 itu di urutan pertama.

“Lembaga survei ini suka tidak suka, sejak 2004 sudah mengambil peranan penting dalam pemilu langsung. Sehingga, kerja mereka, tidak pernah kami nihnikkan. Pasangan Prabowo-Gibran beberapa bulan terakhir selalu di urutan pertama. Tentu ini menjadi dasar keyakinan kami, satu putaran cukup bagi kami,” jelasnya.

Kata dia, meski selalu bertengger di urutan pertama oleh sejumlah lembaga survei, TKN Prabowo-Gibran tak lantas mengundurkan kerja-kerja politik di lapangan. Pihaknya selalu berusaha merebut perhatian pemilih, khususnya generasi milenial dengan cara-cara yang santun.

“Generasi milenial ini populasinya besar. Data CSIS, populasi milenial ini 60 persen dari jumlah pemilih pada 2024. Kami terus berupaya meyakinkan mereka untuk memilih Prabowo-Gibran, tentunya dengan cara-cara milenial,” jelasnya.

Salah satu cara untuk memenangkan hati pemilih milenial, lanjut dia, dengan gencar membuat konten-konten yang ringan dan menarik di media sosial. Pasalnya, dari hasil analisa internal pihaknya, generasi milenial ini sangat antusias terhadap konten politik yang menarik.

“Misalnya, membuat podcast. Membuat video interaktif yang melibatkan generasi milenial. Ini terus kami gencarkan,” ujar Sanggapa. ● RDO

